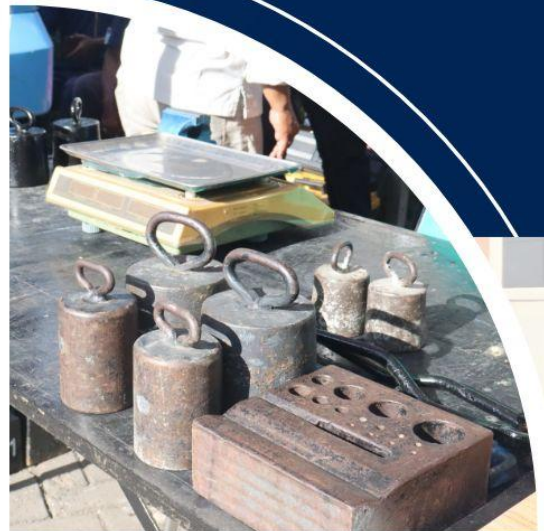


RENSTRA TAHUN 2025-2029

DINAS

PERDAGANGAN DAN

PERINDUSTRIAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun kedepan yang memuat arah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Bogor. RENSTRA ini secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di bidang perdagangan dan perindustrian.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan dinamika pembangunan khususnya dalam 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat terwujudnya kondisi perdagangan dan perindustrian yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja perencanaan dan pengembangan Bidang Urusan Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor.

Cibinong, April 2025

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR,**

ARIF RAHMAN, SH., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 197507232002121008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	13
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II	18
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR	18
2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.....	18
2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	18
2.1.2 SUMBER DAYA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.....	31
2.1.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 39	
2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN.....	45
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	50
BAB III	116
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	116
3.1. TUJUAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029	116
3.2. SASARAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029	117
3.3. STRATEGI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029	119
3.4. ARAH KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029	123
BAB IV	134
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	134
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029	134

4.2	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUCI (IKK) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	135
BAB V	188
PENUTUP	188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor..... 30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Tanah dan Bangunan.....	37
Tabel 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja	39
Tabel 2.2.3 Kendaraan Operasional.....	39
Tabel 2.2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor 2022-2024	65
Tabel 2.2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan.....	68
Tabel 2.2.6 Kertas Kerja Perumusan Permasalahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor	112
Tabel 2.2.7 Kertas Kerja Perumusan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor	113
Tabel 3.3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian .	125
Tabel 3.3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian .	125
Tabel 3.3.3 Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	131
Tabel 4.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan dan perindustrian	136
Tabel 4.1.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029	156
Tabel 4.1.3 Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	177
Tabel 4.1.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.....	183
Tabel 4.1.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.....	185

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat Dokumen Perencanaan baik jangka Panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Dokumen Perencanaan jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (Dua Puluh) Tahunan, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka Panjang daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Lebih lanjut, Dokumen Perencanaan jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Pada Tingkat Perangkat Daerah, diharuskan menyusun dokumen perencanaan menengah lima tahunan berupa Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah serta secara simultan disusun dengan memperhatikan substansi Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Setelah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada bulan Februari 2025, maka dokumen perencanaan mengalami penyesuaian. Renstra

Perubahan 2024-2026 disempurnakan dengan berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih mulai dari tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjabarkan pelaksanaan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Sektor industri dan perdagangan Indonesia tengah mengalami tantangan yang signifikan. Tantangan ketidakpastian baik dari dalam negeri maupun datang dari luar negeri. Salah satu dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi berasal dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat di tengah meningkatnya pemberian insentif fiskal, sementara laju penurunan inflasi tidak secepat yang diperkirakan. Dengan perkembangan saat ini, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan sebesar 3,2%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 4,7-5,5% di tahun 2025. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih dalam jangkauan baik, namun terdapat berbagai tekanan eksternal yang memberikan tekanan besar pada perkembangan sektor perdagangan dan perindustrian.

Mengingat dalam skala nasional, sektor perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) non migas, terbesar kedua setelah industri pengolahan. Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang vital dalam distribusi barang kebutuhan hidup semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu, usaha perdagangan besar dan eceran juga menjadi pencipta lapangan kerja paling besar di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan perencanaan strategis yang optimal dalam menghadapi kondisi tersebut.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian *juncto* Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Perindustrian;
18. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
19. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42);
20. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
21. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
22. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
23. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
24. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
25. Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
26. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal *juncto* Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana & Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
36. Surat Edaran Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda terkait penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129).
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yaitu untuk menjabarkan pelaksanaan program kegiatan Kabupaten Bogor

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
2. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan perindustrian tahun 2025-2029, yang berisi tentang pentingnya pembuatan Renstra dalam menghadapi perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang berdampak bagi kemajuan industri dan perdagangan, perubahan kebijakan Nasional, juga secara ringkas terkait pengertian, fungsi dan proses penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menguraikan peraturan-peraturan, yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, dan pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan perindustrian tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang:

- a. Tugas, fungsi dan struktur Dinas perdagangan dan Perindustrian;
- b. Sumber daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional;
- c. Kinerja pelayanan Dinas perdagangan dan Perindustrian (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), menjelaskan tentang tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan, dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah;
- d. Kelompok sasaran layanan, menjelaskan terkait kelompok-kelompok yang menjadi sasaran layanan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- e. Mitra Perangkat Daerah, menjelaskan terkait pihak-pihak yang menjadi mitra dalam pemberian pelayanan;
- f. Dukungan BUMD, menjelaskan terkait dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja; dan
- g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan tentang hasil identifikasi permasalahan pada pelayanan serta menjelaskan tentang hasil penentuan isu-isu strategis sektor perdagangan dan sektor perindustrian.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029

Menjelaskan tentang tujuan Renstra Dinas perdagangan dan Perindustrian dalam jangka menengah yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 & norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah hasil identifikasi permasalahan pada pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029

Menjelaskan tentang sasaran Renstra Dinas perdagangan dan Perindustrian dalam jangka menengah yang penentuannya didasarkan pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah & norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah hasil identifikasi permasalahan pada pelayanan Perangkat Daerah

3.3 Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029

Menjelaskan tentang strategi dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas perdagangan dan perindustrian

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029

Menjelaskan tentang arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan

dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOGOR

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Berdasarkan bitkan Perbup Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian. Setelah penyesuaian SOTK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi
5. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja Sekretariat;
- b) pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c) pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
- d) pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- e) penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- f) pengelolaan keuangan Dinas;
- g) pengelolaan situs *web* Dinas;

- h) pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan administrasi kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha dinas;
- c) Pengelolaan barang/jasa dinas;
- d) Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- e) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi dinas;
- f) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian dinas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi;

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) Penatausahaan keuangan Dinas;
- c) Penyusunan pelaporan keuangan Dinas;
- d) Pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan kegiatan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Koordinator Program dan Pelaporan

Sub Koordinator Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi program dan pelaporan dalam;

- a) menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan

- program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- b) mengelola penyusunan anggaran Dinas;
 - c) mengelola situs web Dinas; dan
 - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaku distribusi perdagangan, sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja bidang perdagangan;
- b) Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan bidang pelaku distribusi perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi perdagangan;
- c) Penyusunan rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta tanda daftar gudang;
- d) Pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
- e) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan/revitalisasi, rehabilitasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- f) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- g) Penyusunan rekomendasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba;
- h) Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan terhadap distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- i) Penyusunan rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar;
- j) Pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- k) Pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha;
- l) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- m) Pelaksanaan promosi dan peningkatan akses pasar;

- n) Pelaksanaan, partisipasi dan penyediaan layanan informasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor;
- o) Pelaksanaan atau partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor;
- p) Penerbitan surat keterangan asal;
- q) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada bidang Perdagangan;
- r) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- s) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1) Sub Koordinator Pelaku Distribusi Perdagangan

mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pelaku Distribusi Perdagangan dalam:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan Pelaku Distribusi Perdagangan;
- b) Fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
- c) Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang;
- d) Fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba;
- e) Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan;
- f) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi komoditi penerbitan pedagang kayu antarpulau terdaftar;
- g) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan terhadap distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Koordinator Sarana Distribusi Perdagangan

mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Sarana Distribusi Perdagangan dalam:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan sarana distribusi perdagangan;
- b) Melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
- c) Melaksanakan perencanaan, pembangunan/revitalisasi, rehabilitasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Koordinator Fasilitas Perdagangan

mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Fasilitas Perdagangan dalam:

- a) Meyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan fasilitas perdagangan;
- b) Melaksanakan identifikasi dan fasilitas pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
- c) Melaksanakan identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- d) Fasilitas dan/atau peningkatan kemitraan usaha dan akses pasar produk dalam negeri;
- e) Menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan serta pelaku usaha sektor perdagangan;
- f) Fasilitas pengembangan dan kerjasama ekspor, impor dan promosi;
- g) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis ekspor, impor dan promosi;
- h) Melaksanakan pengawasan ekspor, impor dan promosi;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan

laporan kegiatan; dan

- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Tertib Niaga

Bidang Tertib Niaga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian barang pokok dan penting, kemetrolagian dan pengawasan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tertib Niaga mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja bidang pengendalian barang pokok dan penting, kemetrolagian dan pengawasan;
- b) penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan bidang pengendalian barang pokok dan penting, kemetrolagian dan pengawasan;
- c) penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d) pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e) pengoordinasian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f) pemantauan harga, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g) penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h) pelaksanaan dan pengoordinasian operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- i) pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j) pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- k) pengoordinasian dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer;
- l) pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- m) pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang, dan

- perlengkapannya;
- n) pengelolaan cap tanda tera;
 - o) penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian;
 - p) pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolagian;
 - q) pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - r) pengawasan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan satuan ukuran;
 - s) pelaksanaan dan/atau fasilitasi penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
 - t) pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Tertib Niaga;
 - u) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - v) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1) Sub Koordinator Pengendalian Barang Pokok dan Penting

mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting dalam:

- a) menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengendalian barang pokok dan penting;
- b) melaksanakan pengawasan distribusi barang pokok dan penting serta barang yang diatur;
- c) menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d) melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e) mengoordinasikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f) memantau harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g) menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang

- penting;
- h) melaksanakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
 - i) mengoordinasikan pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah;
 - j) mengawasi pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - k) mengawasi pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
 - l) mengoordinasikan dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer;
 - m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - n) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Koordinator Kemetrolgian

Mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Kemetrolgian dalam:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kemetrolgian;
- b) Menyediakan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- c) Mengelola cap tanda tera;
- d) Menyediakan dan penjaminan ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
- e) Menyusun dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Koordinator Pengawasan

Mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengawasan dalam:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengawasan dan bina sumber

- daya manusia kemetrolgian;
- b) Melaksanakan pemetaan jumlah potensi tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP);
 - c) Melaksanakan pengawasan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran;
 - d) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan perangkat daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
 - e) Membina terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolgian;
 - f) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
 - g) Melaksanakan dan/atau fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
 - h) Melaksanakan dan/atau fasilitasi penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
 - i) Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur;
 - j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pembangunan sumber daya industri, pengolahan dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri dan sarana prasarana dan pemberdayaan industri. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja Bidang industri;
- b) Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan bidang

pembangunan sumber daya industri, pengolahan dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri dan sarana prasarana dan pemberdayaan industri;

- c) Pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
- d) Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam;
- e) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi serta pemanfaatan Teknologi Industri;
- f) Pelaksanaan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- g) Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan industri berbasis sistem informasi industri nasional;
- h) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri berbasis sistem informasi industri nasional;
- i) Pelaksanaan dan/atau pengoordinasian promosi investasi industri dan fasilitasi insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- j) Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan serta pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
- k) Fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- l) Pelaksanaan standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- m) Pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Perindustrian;
- n) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1) Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri

Mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri dalam:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pembangunan sumber daya industri;
- b) Membangun tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
- c) Fasilitasi pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam;
- d) Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e) Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- f) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Koordinator Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri

mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri dalam:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- b) Menyiapkan bahan perjanjian kerjasama serta pengadministrasian kerjasama;
- c) Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan industri;
- d) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha;
- e) Melaksanakan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industri kecil, izin usaha industri

- menengah dan izin usaha kawasan industri;
- f) Melaksanakan dan/atau pengoordinasian promosi investasi industri dan fasilitasi insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - g) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri dalam:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan sarana prasarana dan pemberdayaan industri;
- b) Melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan;
- c) Fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
- d) Melaksanakan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
- e) Melaksanakan standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
- f) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, disajikan dalam gambar berikut:

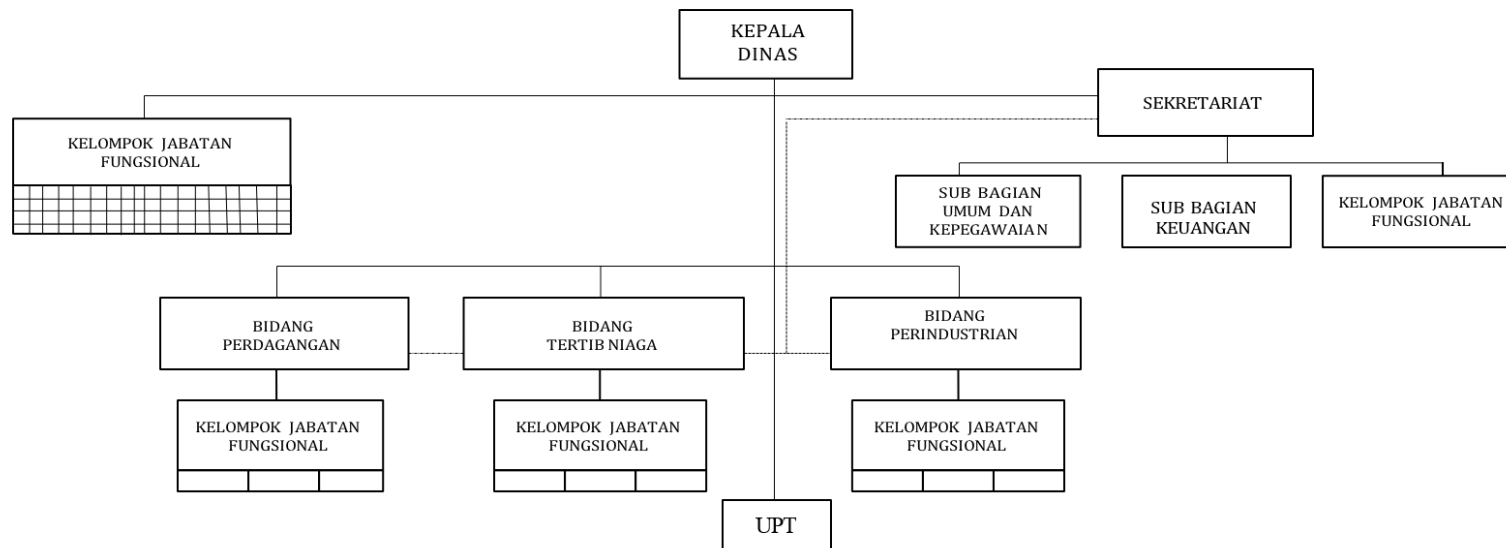
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 22 Tahun 2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



Keterangan

— : Garis Instruktif

----- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Gambar 2.1.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

2.1.2 SUMBER DAYA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

a) Kondisi Umum Pegawai

Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi. Berdasarkan peta jabatan kebutuhan pegawai Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Bogor, berikut Analisa kebutuhan peta jabatan:

1) Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Sub Koordinator Program dan Pelaporan				
Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Perencana Ahli Muda	9	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Keterangan:

Kelas = skor berdasarkan perbup

B = budgeting/keadaan saat ini

K = kebutuhan

+/- = keterangan lebih/kurang

Catatan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 Kombinasi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Koordinator Program dan Pelaporan menunjukkan kekurangan personel yang cukup signifikan. Perencana dan Penelaah Teknis menduduki posisi strategis dan butuh segera diisi, karena perannya krusial dalam perencanaan dan evaluasi program. Serta Pelaksana teknis dan administrasi pun penting sebagai pendukung logistik dan data.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
(kelas 9)				
Jabatan	kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Pranata SDM Aparatur Terampil	6	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

Keterangan:

Kelas = skor berdasarkan perbup

B = budgeting/keadaan saat ini

K = kebutuhan

+/- = keterangan lebih/kurang

Catatan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Kombinasi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menunjukkan kekurangan personel sebanyak 4 Orang. Pada sub bagian ini kekurangan personil pada

posisi arsiparis terampil dan Pranata SDM Aparatur. Pada posisi arsiparis cukup dibutuhkan karena memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan arsip pada tingkat keterampilan. Sedangkan Pranata SDM Aparatur memiliki tugas mengelola manajemen kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur jadi kedua posisi tersebut cukup strategis. Selain 2 posisi diatas pengadministrasi perkantoran pun tidak kalah penting karena merupakan tulang punggung dalam pengerjaan seluruh proses administrasi setiap harinya.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN				
(kelas 9)				
Jabatan	kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Keterangan:

Kelas = skor berdasarkan perbup

B = budgeting/keadaan saat ini

K = kebutuhan

+/- = keterangan lebih/kurang

Catatan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Pada sub bagian keuangan ada 2 personil kurang yaitu pada posisi Penelaah Teknis Kebijakan dan 1 personil untuk pengadministrasi perkantoran. Pada posisi Penelaah Teknis Kebijakan sangat dibutuhkan karena segala bentuk kegiatan telaah, analisis, dan penyusunan rekomendasi teknis terhadap kebijakan pada sub bagian ini ditentukan oleh posisi tersebut.

2) Bidang Perdagangan

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN				
(kelas 11)				
Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analisis Perdagangan Ahli Muda	10	1	2	-1
Analisis Perdagangan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Fasilitator Perdagangan	7	2	2	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	9	-7
Pengolah Data dan Informasi	6	3	3	0
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Keterangan:

Kelas = skor berdasarkan perbup

B = budgeting/keadaan saat ini

K = kebutuhan

+/- = keterangan lebih/kurang

Catatan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Pada bidang perdagangan sangat dibutuhkan posisi yang cukup krusial yaitu analisis perdagangan. Analisis Perdagangan memiliki tugas dan fungsi utama dalam melakukan kajian, telaahan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan. Jabatan ini berperan penting dalam menganalisis dinamika perdagangan dalam negeri dan luar negeri, termasuk stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, distribusi barang, serta potensi ekspor-impor. Selain posisi tersebut banyak kebutuhan untuk Penelaah Teknis Kebijakan yang belum terpenuhi.

3) Bidang Tertib Niaga

KEPALA BIDANG TERTIB NIAGA				
(kelas 11)				
Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analisis Perdagangan Ahli Muda	10	0	1	-1
Pengawas Perdagangan Ahli Muda	10	3	4	-1
Penera Ahli Muda	9	5	5	0
Penera Ahli Pertama	8	0	6	-6
Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	8	2	6	-4
Penera Penyelia	8	1	2	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Penata Layanan Operasional	7	0	3	-3
Penera Mahir	7	0	4	-4
Pengawas Barang Beredar dan Jasa	7	0	1	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	1	2	-1
Penera Terampil	6	0	7	-7
Pengolah Data dan Informasi	6	7	7	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Keterangan:

Kelas = skor berdasarkan perbup

B = budgeting/keadaan saat ini

K = kebutuhan

+/- = keterangan lebih/kurang

Catatan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Pada Bidang Tertib Niaga kebutuhan personil paling besar yaitu pada posisi Penera. Penera merupakan pejabat fungsional yang memiliki peran penting dalam menjamin ketertiban dan keadilan dalam transaksi perdagangan melalui pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Selain Posisi penera kebutuhan personil di Pengawas Perdagangan Ahli Pertama yang memiliki tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan perdagangan guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi utama jabatan ini meliputi pemeriksaan terhadap barang beredar, pemantauan kegiatan perdagangan, serta pengawasan terhadap pelaku usaha, termasuk kegiatan distribusi, niaga elektronik (e-commerce), dan harga barang kebutuhan pokok. Selain dua jabatan fungsional ini ada pula beberapa jabatan fungsional umum yang dibutuhkan.

4) Bidang perindustrian

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN				
(kelas 11)				
Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	2	2	0
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	8	-3
Pengawas Industri	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	3	3	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Keterangan:

Kelas = skor berdasarkan perbup

B = budgeting/keadaan saat ini

K = kebutuhan
 +/- = keterangan lebih/kurang

Catatan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Pada Bidang Perindustrian Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penelaah Teknis Kebijakan paling banyak dibutuhkan. Selain itu Penyuluh Perindustrian juga masih memiliki kekurangan personil. Penyuluh Perindustrian adalah jabatan fungsional tertentu (JFT) yang memiliki tugas memberikan penyuluhan, pendampingan, dan pemberdayaan kepada pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM), agar mampu tumbuh, berkembang, dan berdaya saing.

b) Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Sarana kerja yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai, ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini

**Tabel 2.2.1 Tanah dan Bangunan
 Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

NO.	URAIAN	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH
1	Pasar Rakyat Cibinong (Desa Cirimekar)	80,150 M ²	10,423 M ²
2	Pasar Rakyat Cileungsi (Desa Cileungsi Kidul)	21,300 M ²	29,025 M ²
3	Pasar Rakyat Citeureup I (Desa Citeureup)	10,000 M ²	17,000 M ²
4	Pasar Rakyat Citeureup II (Desa Citeureup)	4,760 M ²	9,472 M ²
5	Pasar Rakyat Cariu (Desa Cariu)	5,845 M ²	11,520 M ²
6	Pasar Rakyat Cisarua (Desa Citeko)	8,000 M ²	12,000 M ²
7	Pasar Rakyat Parungpanjang (Desa Parungpanjang)	10,004 M ²	16,038 M ²
8	Pasar Rakyat Leuwiliang (Desa Leuwiliang)	11,466 M ²	21,714 M ²
9	Pasar Rakyat Ciomas (Desa laladon)	998 M ²	8,300 M ²
10	Pasar Rakyat Ciawi (Desa Ciawi)	810 M ²	1,050 M ²
11	Pasar Rakyat Jasinga (Desa Sipak)	6,728 M ²	18,000 M ²
12	Pasar Rakyat Ciampea (Desa Ciampea)	-	6,000 M ²

NO.	URAIAN	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH
13	Pasar Rakyat Parung (Desa Waru)	43,677 M ²	48,525 M ²
14	Pasar Rakyat Sukaraja (Desa Cijujung)	1,800 M ²	4,200 M ²
15	Pasar Rakyat Cigombong (Desa Cigombong)	2,000 M ²	4,821 M ²
16	Pasar Rakyat Rumpin (Desa Cicangkal)	7,000 M ²	10,918 M ²
17	Pasar Rakyat Bojong Gede (Desa Pabuaran)	3,705 M ²	5,500 M ²
18	Pasar Rakyat Cigudeg (Desa Cicopong)	4,025 M ²	7,472 M ²
19	Pasar Rakyat Ciseeng (Desa Parigi Mekar)	1,367 M ²	8,050 M ²
20	Pasar Rakyat Gunung Sindur (Desa Gunung Sindur)	3,500 M ²	4,000 M ²
21	Pasar Rakyat Caringin (Desa Ciderum)	2,200 M ²	4,180 M ²
22	Pasar Rakyat Pamijahan (Desa Cimayang)	3,705 M ²	5,500 M ²
23	Pasar Rakyat Nanggung (Desa Nanggung)	1,500 M ²	5,562 M ²
24	Pasar Rakyat Kemang (Desa Kemang)	1,500 M ²	3,000 M ²
25	Pasar Rakyat Leuwisadeng (Desa Leuwisadeng)	1,500 M ²	3,000 M ²
26	Pasar Rakyat Tenjo (Desa Tenjo)	1,800 M ²	4,429 M ²
27	Pasar Rakyat Cijeruk (Desa Cipelang)	620 M ²	5,438 M ²
28	Pasar Rakyat Babakanmadang (Desa Sumurbatu)	765 M ²	3,000 M ²
29	Pasar Rakyat Tamansari (Desa Sirnagalih)	620 M ²	2,978 M ²
30	Tanah UPT PIK (Bangunan Kantor Pemerintah Eks. Kantor Camat Ciomas)		3,642 M ²
31	Tanah kosong (yang sudah diperuntukan relokasi PKL)		700 M ²
32	Pasar Rakyat Gunung Puteri (Desa Tlajung Udik)	1.426 M ²	7.287 M ²

**Tabel 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Listrik	3	Jaringan
2	Telepon	3	Jaringan
3	Area Parkir	1	Area
4	Ruang Rapat	2	Ruang
5	Ruang Arsip	1	Ruang
6	Ruang Multifungsi	1	Area
11	Jaringan Internet	2	Jaringan
13	Area Taman Luar	1	Area
14	Mesin Proses	213	Unit
15	Personal Komputer PC	69	Unit
16	Laptop	69	Unit
17	Printer	64	Unit
18	Monitor Interaktif	26	Unit (disebar ke 26 pasar & rest area)

**Tabel 2.2.3 Kendaraan Operasional
Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

NO	URAIAN	QTY	KETERANGAN
1	Sepeda Motor	12 unit	Kondisi baik
2	Mobil	12 unit	Kondisi baik

2.1.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Rata-rata pencapaian realisasi kinerja Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Dinas Perdagangan dan perindustrian tahun 2024, secara lengkap dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

a) Capaian Indikator Tujuan

- 1) Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan adalah salah satu parameter ekonomi yang menggambarkan selisih antara nilai produksi (output) dan biaya antara (biaya yang habis dipakai selama proses produksi) dari suatu produk, baik barang maupun jasa. Nilai NTB sangat

penting untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto dari suatu daerah, yang merupakan penjumlahan dari NTB di semua industri. Berdasarkan hasil laporan evaluasi kinerja triwulan IV Pada akhir tahun 2024 Nilai Tambah Bruto (NTB) perdagangan terealisasi sebesar 38.367.000 (Milyar/Rupiah) dari target 35.840.869 (Milyar/Rupiah) atau dengan tingkat capaian sebesar 107,05%.

2) Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri adalah salah satu parameter ekonomi yang menggambarkan selisih antara nilai produksi (output) dan biaya antara (biaya yang habis dipakai selama proses produksi) dari suatu produk, baik barang maupun jasa. Nilai NTB sangat penting untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto dari suatu daerah, yang merupakan penjumlahan dari NTB di semua industri. Berdasarkan hasil laporan evaluasi kinerja triwulan IV Pada akhir tahun 2024 Nilai Tambah Bruto (NTB) perindustrian terealisasi sebesar 160.985.000 (Milyar/Rupiah) dari target 151.653.375 (Milyar/Rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 106,15%.

➤ Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor menunjukkan capaian kinerja yang sangat positif. Hal ini terlihat dari realisasi Nilai Tambah Bruto (NTB) pada dua sektor utama, yaitu perdagangan dan perindustrian, yang masing-masing melampaui target tahunan. NTB sektor perdagangan terealisasi sebesar 107,05%, sedangkan NTB sektor industri mencapai 106,15%. Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Keberhasilan ini tidak terlepas dari efektivitas program-program penguatan sektor riil yang dijalankan oleh dinas, seperti pembinaan pelaku usaha, promosi dagang, stabilisasi harga, serta penguatan ekosistem industri kecil dan menengah. Capaian ini juga menjadi landasan penting dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih progresif dan berkelanjutan di tahun mendatang.

b) Capaian Indikator Sasaran

- 1) Nilai ekspor adalah parameter untuk menggambarkan pertumbuhan capaian nilai ekspor tahun berjalan yang di bandingkan dengan capaian nilai ekspor tahun n-1 terealisasi sebesar 2,15% dari target 2,14% dengan tingkat capaian sebesar 100,59%.
 - Capaian nilai ekspor Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sebesar 2,15% dari target 2,14%, dengan tingkat capaian 100,59%, mencerminkan bahwa strategi promosi dan penguatan produk ekspor yang telah dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah berjalan dengan baik. Walaupun kenaikannya tidak signifikan secara angka, keberhasilan melampaui target tetap menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan pengembangan produk ekspor Kabupaten Bogor telah tepat. Hal ini perlu dijadikan dasar untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan diversifikasi produk ekspor, dan memperkuat kemitraan global bagi pelaku usaha daerah, khususnya sektor industri pengolahan dan UMKM yang potensial ekspor.
- 2) Presentase cakupan layanan wajib tera dan tera ulang merupakan gambaran pelaksanaan tera/tera ulang pada 40-kecamatan di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2024 pelaksanaan tera/tera ulang terealisasi 121,00 % dari target 80,02% dengan tingkat capaian 151,21%.
 - Capaian cakupan layanan wajib tera dan tera ulang pada tahun 2024 sebesar 121,00% dari target 80,02%, dengan tingkat capaian 151,21%, menunjukkan keberhasilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dalam meningkatkan pengawasan dan legalitas alat ukur di wilayahnya. Capaian ini menggambarkan bahwa pelayanan tera telah menjangkau lebih banyak pelaku usaha dari yang ditargetkan, baik melalui pendekatan teknis, edukatif, maupun operasional. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kinerja metrologi legal, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen dan pelaku usaha terhadap sistem perdagangan yang adil dan transparan. Kinerja ini perlu terus dipertahankan dan diperluas pada tahun mendatang, termasuk

di wilayah terpencil atau pasar yang belum terjangkau secara optimal

3) Presentase pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan merupakan indikator yang menggambarkan ketersesuaian antara RPIK dengan RIPIN dan RIPP. Berdasarkan pencapaian tahun 2024 Presentase pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan tersebut tercapai 50,75% dari target 50,45 dengan tingkat capaian 100,59%.

- Presentase pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan antara pembangunan sentra industri di daerah dengan dokumen perencanaan sektor industri, yaitu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), serta Rencana Induk Pembangunan Provinsi (RIPP). Indikator ini menggambarkan sejauh mana pembangunan sentra industri yang dilakukan telah mengikuti arah kebijakan dan perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan secara nasional dan regional. Berdasarkan hasil capaian tahun 2024, persentase pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan tercapai sebesar 50,75% dari target sebesar 50,45%, dengan tingkat capaian sebesar 100,59%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan sentra industri di Kabupaten Bogor telah berada di atas target, dan secara umum sudah selaras dengan perencanaan strategis industri yang berlaku. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mendorong pembangunan kawasan industri yang terarah, berkelanjutan, dan terintegrasi. Dengan mengacu pada RPIK, RIPIN, dan RIPP, maka pengembangan sentra industri tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara makro dan menjaga kesinambungan kebijakan antar level pemerintahan. Ke depan, kesinambungan pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan ini perlu terus dijaga, dengan penguatan

perencanaan, sinkronisasi antar sektor, serta dukungan terhadap infrastruktur dan SDM industri.

c) Realisasi Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- a) Capaian indicator seluruh program
- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dari pagu anggaran Rp.19.761.861.548,- terealisasi sebesar 95,93 % dengan nilai sebesar Rp. 19.239.194.474,- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 100% terealisasi 100%.
 - 2) Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dari pagu anggaran Rp.2.085.615.743,- terealisasi sebesar 97,88 % dengan nilai sebesar Rp.2.041.326.016. sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 66,00 % terealisasi 66,00 % atau 100%
 - 3) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dari pagu anggaran Rp.15.063.997.046.- terealisasi sebesar 96,57 % dengan nilai sebesar Rp.14.547.086.741.- sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 33,33% terealisasi 33,33% atau 100%
 - 4) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dari pagu anggaran Rp.924.368.364.- terealisasi sebesar 98,87 % dengan nilai sebesar Rp.913.920.388,- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 100% terealisasi 100%.
 - 5) Program pengembangan ekspor dari pagu anggaran Rp.1.360.001.317.- terealisasi sebesar 95,85% dengan nilai sebesar Rp.1.303.559.527.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 1.532.650.000 USD terealisasi 1.875.427.336 USD atau 122,37%
 - 6) Program standardisasi dan perlindungan konsumen dari pagu anggaran Rp.1.782.068.168.- terealisasi sebesar 99,77 % dengan nilai sebesar Rp.1.778.039.811.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target persentase 57,42% terealisasi 57,42% atau 100%
 - 7) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dari pagu anggaran Rp.87.399.552.- terealisasi sebesar 98,42%

dengan nilai sebesar Rp.86.021.552.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 33,33 Jenis terealisasi 33,33 Jenis atau 100%

- 8) Program perencanaan dan pembangunan industri dari pagu anggaran Rp.1.958.716.430.- terealisasi sebesar 97,07% dengan nilai sebesar Rp.1.901.320.359.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 50,45% terealisasi 50,75% atau 100,59%
 - 9) Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota: dari pagu anggaran Rp.2.037.860.243.- terealisasi sebesar 98,60% dengan nilai sebesar Rp.2.009.430.743.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target persentase 3,3% terealisasi 3,3% atau 100%
 - 10) Program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan target Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini: dari pagu anggaran Rp.1.598.886.046.- terealisasi sebesar 98,21% dengan nilai sebesar Rp.1.570.295.620.- Sedangkan realisasi capaian kinerja dari target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen atau 100%
- b) Program Kegiatan yang melebihi target kinerja antara lain:
- 1) Program Pengembangan Ekspor, realisasi capaian kinerja dari target 1.532.650.000 USD terealisasi 1.875.427.336 USD atau 121,53%.
 - Tingginya capaian nilai ekspor Kabupaten Bogor menggambarkan keberhasilan luar biasa dalam mendorong produk lokal ke pasar internasional. Realisasi di atas 100% ini menunjukkan efektivitas strategi promosi ekspor, fasilitasi kepada pelaku usaha, serta peningkatan kapasitas produksi komoditas unggulan di kabupaten tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa eksportir dan pelaku UMKM mampu memperluas pangsa pasar global, meningkatkan volume ekspor, dan mengoptimalkan nilai transaksi. Pencapaian ini tidak hanya memenuhi target, tetapi juga menciptakan momentum baru untuk pertumbuhan ekonomi, memperkuat devisa daerah, dan mendongkrak reputasi produk lokal di pasar global. Ini

menjadi pijakan strategis dalam menetapkan target lebih ambisius dan memperluas kapasitas pengembangan ekspor di masa mendatang.

- 2) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, realisasi capaian kinerja dari target persentase 50,45% terealisasi 50,75% atau 100,59%.
 - Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pendataan, dan pengawasan terhadap sasaran pembangunan industri telah dilakukan dengan cermat, akurat, dan tepat waktu oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan instansi terkait menandakan efektivitas koordinasi dan implementasi kebijakan industri daerah. capaian ini mencerminkan stabilitas pelaksanaan program yang tidak mengalami deviasi besar, melainkan berhasil memenuhi semua komponen kegiatan perencanaan industri. Ini juga mencerminkan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik, sehingga target-target kecil di dalam RPIP dapat terlaksana secara penuh dan tuntas.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh rata-rata tingkat capaian program (*outcome*) sebesar 101,77% dengan predikat kerja **SANGAT TINGGI**.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

- a) Mitra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memberikan pelayanan

- 1) Kamar Dagang Indonesia (KADIN)

KADIN merupakan sebuah organisasi yang menghimpun seluruh pengusaha di Indonesia. Sebagai Landasan konstitusional pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar pembangunan ekonomi, para pelaku usaha didorong ikut serta dalam pembangunan nasional ekonomi Indonesia. KADIN merupakan mitra strategis Pemerintah dalam mendorong pergerakan dunia usaha di Indonesia. Oleh karena itu, KADIN dituntut untuk dapat responsif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, agar setiap gerak pembangunan dapat kita optimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

2) Hiswana Migas

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) merupakan organisasi yang dibentuk karena diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 1971 dan Keppres Nomor 44 Tahun 1975 tentang Pertamina, yang mencakup tanggung jawab Pertamina khususnya PPDN menjadi semakin berat, yang berimbas pada tuntutan kepada para agen dan Transportir BBM untuk ikut serta lebih signifikan dalam proses penyaluran BBM yang merupakan barang Pokok dan vital di masyarakat. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor secara langsung bekerja sama dengan Hiswana Migas memastikan pendistribusian pasokan BBM dan Gas Merata di seluruh pelosok Kabupaten Bogor.

3) Distributor/Agen Pupuk Bersubsidi

Pupuk yang beredar di masyarakat ada Pupuk Bersubsidi maupun Pupuk Non-Subsidi. Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor secara aktif harus memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi dapat dijalankan secara sesuai. Alur pendistribusian pupuk diawali dengan adanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) data penerimaan pupuk subsidi yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan) Melalui data ini kebutuhan pupuk subsidi dapat terorganisir hingga sampai ke tangan petani selaku penerima pupuk subsidi. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor memiliki tanggung jawab ditingkat pembinaan Kabupaten / kota meliputi : melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan, yang disesuaikan dengan kondisi setempat, menyusun alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan. Adapun penyaluran kepada petani agar dikoordinasikan dengan Camat dan Penyuluh setempat, serta Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

b) Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

1) PT. SAYAGA WISATA

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bogor bersama PT. Perkebunan Nasional VIII dan Kementerian PUPR sepakat untuk melakukan penataan Kawasan puncak dan untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 05/PKS/SJ/2019, 119/18/KB/KS/V/2019, KB/111.5/461/V/2019 tentang Penataan Kawasan Puncak Kabupaten Bogor untuk Penanganan Kawasan Strategis Nasional. Luas lahan yang dipakai untuk penataan rest area tersebut seluas ± 7 Ha. Pada tahun 2020 pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Cipta Karya diantaranya

- Masjid
- bangunan utilitas
- plaza pandang
- bangunan meeting point
- toilet umum
- area parkir
- kolam retensi
- tempat penampungan sampah 3R
- amphitheater
- docking station, dan
- posko siaga bencana

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor membangun kios sebanyak 448 terdiri dari 48 kios basah dan 400 kios kering serta pembangunan pagar keliling rest area dan monument yang berada di gerbang utama.

Selanjutnya pada tahun 2021 pembangunan kios dilanjutkan dengan membangun 68 kios, total kios yang terbangun sebanyak 516 kios. Pada periode tahun anggaran 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian beserta Kementerian Cipta Karya melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana rest area

berupa pembuatan landscape rest area, penyambungan listrik dan penataan area kios.

Sehubungan dengan kondisi fisik bangunan rest area yang sudah terselesaikan, maka berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 510.17/519-Perek tanggal 22 juni tahun 2022 untuk pengelolaan sementara Rest Area Gunung Mas Puncak akan dilaksanakan oleh PT. Sayaga Wisata.

2) Perumda Pasar Tohaga

Pasar Tohaga adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang melaksanakan pelayanan umum dalam pengelolaan area Pasar, membina pedagang, serta bersinergi dengan Dinas dan instansi terkait guna meningkatkan indeks prestasi masyarakat Kabupaten Bogor. Pasar Tohaga memiliki 31 pasar rakyat yang dikelola dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bogor dan menyediakan beragam kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.

Kinerja pelayanan Perumda Pasar Tohaga sangat berpengaruh terhadap capaian beberapa program/kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di antaranya:

- a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indicator “Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan”. Dalam pencapaian indicator tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan:
 - 1) Pembangunan/revitalisasi pasar
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana pasar (Pasar SNI)
 - 3) Pembinaan terhadap pengelola pasar
 - 4) Pemberdayaan pengelola pasar
- b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Selain melakukan pekerjaan fisik bangunan pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan pemantauan terhadap ketersediaan barang pokok dan barang penting guna menjaga kestabilan harga dan stok barang kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.

Untuk itu Perumda Pasar Tohaga diwajibkan melaporkan harga barang pokok dan barang penting pada setiap pasar di masing-masing wilayah. Barang pokok dan barang penting tersebut antara lain:

NO	JENIS KOMODITI
	SEBAKO & HASIL INDUSTRI
1	Beras Medium
2	Beras Premium
3	Blue Band Margarine
4	Emping Melinjo
5	Garam Konsumsi Beryodium
6	Gula Merah Kelapa
7	Gula Pasir
8	Kerupuk Udang
9	Minyak Goreng Kemasan
10	Minyak Goreng Curah
11	Tepung Terigu (segitiga biru)

NO	JENIS KOMODITI		
	BUMBU MASAK & SAYUR MAYUR		
1	Bawang Merah	15	Kacang Tanah Kupas
2	Bawang Putih	16	Kangkung
3	Bayam	17	Kelapa Kupas
4	Buncis	18	Kembang Kol
5	Cabe Merah	19	Kentang
6	Cabe Merah Keriting	20	Ketimun
7	Cabe Rawit Hijau	21	Kol Putih
8	Cabe Rawit Merah	22	Labu Siam
9	Daun Bawang	23	Tomat
10	Daun Seledri	24	Wortel
11	Jahe Gajah		
12	Kacang Hijau		
13	Kacang Kedelai		
14	Kacang Panjang		

NO	JENIS KOMODITI
	DAGING, AYAM & TELOR
1	Ayam Kampung Hidup
2	Ayam Ras Hidup
3	Daging Ayam Ras
4	Daging Sapi (murni)
5	Telur Ayam kampung
6	Telur Ayam Ras

NO	JENIS KOMODITI
	IKAN SEGAR & IKAN ASIN
1	Bandeng
2	Cumi-Cumi
3	Kembung
4	Mas
5	Mujair
6	Selar
7	Teri
8	Tongkol
9	Udang Windu
10	Cumi-Cumi Asin
11	Gabus Asin
12	Peda Merah
13	Teri Medan

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan (gap) antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam perencanaan daerah permasalahan ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

- a) Aspek Geografi
 - 1) Masih tingginya risiko bencana
 - 2) Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup
 - 3) Semakin meluasnya titik wilayah yang terdampak bencana alam.
 - 4) Kurangnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- b) Aspek Demografi
 - 1) Laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi

- 2) Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah
 - 3) Jumlah penduduk usia tua yang cenderung meningkat
 - 4) Tingkat urbanisasi yang masih tinggi
- c) Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 1) Masih tingginya angka kemiskinan
 - 2) Masih banyaknya penduduk yang menganggur/mencari pekerjaan akibat masih rendahnya kesempatan kerja
 - 3) Masih tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada ketimpangan mengakses sumber-sumber ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat
 - 4) Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - 5) Belum optimalnya pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya local
- d) Aspek Daya Saing
- 1) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia dilihat dari pendidikan, kesehatan dan daya beli
 - 2) Belum meratanya pemenuhan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi masyarakat
 - 3) Belum optimalnya pemenuhan kualitas angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
 - 4) Belum optimalnya kinerja dan kapasitas usaha dan daya saing IKM/UMKM
- e) Aspek Pelayanan Umum
- 1) Belum optimalnya pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar
 - 2) Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi daerah
 - 3) Belum optimalnya implementasi kompetensi aparatur
 - 4) Penggunaan teknologi untuk pembangunan/pelayanan publik yang belum optimal

Selain itu dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengacu pada permasalahan yang ada dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bogor. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bogor dilakukan dengan proses partisipatif yang

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses penyusunannya dilaksanakan melalui proses komunikasi yang intensif untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian KLHS yang disusun dapat memenuhi aspek legalitas dan legitimasi.

Pembuatan KLHS melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang meliputi:

- 1) Pemberian pendapat, saran, dan usul;
- 2) Pendampingan tenaga ahli;
- 3) Bantuan teknis, dan
- 4) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan
- 5) Masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
- 6) Masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Berdasarkan hal tersebut diperlukan teknik komunikasi dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bogor seperti konsultasi publik, Focus Group Discussion (FGD), curhat pendapat, Tim Ahli/Pendamping, perwakilan komunitas, studi literatur (pemanfaatan dokumen atau kajian yang ada)

Analisis dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bogor dapat menjadi dasar strategis untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci dan merumuskan pendekatan komunikasi atau keterlibatan yang sesuai. Analisis ini membantu organisasi atau proyek untuk merancang strategi keterlibatan dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan karakteristik kekuatan dan kepentingan mereka. Berikut analisis Dinas Perdagangan dan perindustrian berdasarkan dokumen KLHS Kabupaten Bogor 2025-2029.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki peran yang penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Peran dinas ini terkait dengan pengembangan sektor industri, perdagangan internasional, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa peran utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam konteks pencapaian TPB:

Salah satu peran utama dinas ini adalah mendukung pengembangan sektor industri di wilayahnya. Hal ini mencakup pemberian insentif kepada perusahaan, pemberian fasilitas dalam perizinan usaha, dan pengembangan kawasan industri. Dinas ini berperan dalam meningkatkan daya saing industri lokal. Ini dapat melibatkan program pelatihan, bantuan teknis, dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat mempromosikan wilayahnya sebagai tujuan investasi bagi perusahaan lokal dan asing. Ini dapat membantu meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dinas ini memantau dan mengawasi perdagangan internasional di wilayahnya. Mereka juga dapat memberikan informasi dan bimbingan kepada pelaku usaha yang ingin terlibat dalam perdagangan internasional.

Dinas ini berperan dalam mempromosikan ekspor produk-produk lokal ke pasar internasional. Ini membantu meningkatkan pendapatan ekspor dan mendiversifikasi ekonomi lokal. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendukung pengembangan UKM dengan memberikan pelatihan, akses ke pembiayaan, dan bantuan teknis. UKM sering kali menjadi penyumbang signifikan terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Dinas ini memantau harga dan kualitas produk yang beredar di pasar lokal. Ini penting untuk melindungi konsumen dan memastikan persaingan yang sehat. Dinas ini berperan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan industri dan perdagangan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup kebijakan lingkungan, pajak, dan regulasi perdagangan. Dinas ini dapat mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan, termasuk pemakaian energi yang efisien dan ramah lingkungan, serta penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Dinas ini memantau kinerja sektor perdagangan dan industri serta mengukur dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Data

ini digunakan untuk melacak kemajuan dalam mencapai target TPB yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perdagangan dan perindustrian melakukan Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di perlukan dalam rangka pembangunan sektor perdagangan dan industri di Kabupaten Bogor. Berikut beberapa permasalahan yang mewakili bidang-bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan analisis kekinian:

- a) Kemitraan antara pelaku usaha mikro dan toko modern masih belum berjalan optimal;
- b) Sarana dan prasarana distribusi perdagangan belum memenuhi standar;
- c) Kontribusi produk ekspor dari Kabupaten Bogor masih rendah;
- d) Pengawasan harga barang pokok dan barang penting serta distribusi rantai pasok belum optimal;
- e) Pelayanan dan pengawasan kemetrolagian belum menjangkau seluruh wilayah dan pelaku usaha;
- f) Pengembangan dan penguatan sentra IKM belum optimal;
- g) Kepatuhan pelaku industri kecil terhadap akses sistem perizinan berbasis risiko dan regulasi industri masih rendah
- h) Pemanfaatan teknologi produksi dan penerapan standardisasi industri masih terbatas;

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berpedoman pada isu strategis yang relevan pada dokumen RPJMD untuk 2025-2029 antara lain:

a) Isu Strategis Nasional

1) Bonus Demografi Indonesia

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu, produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN.

Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif yang tinggi sebagai modal utama pembangunan. Penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya. Selain itu, penduduk usia produktif yang dominan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk- produk berkualitas (*consuming class*)

di dunia. *consuming class* ini berpotensi akan terus bertambah dan dapat mendorong pertumbuhan dari sisi konsumsi tetapi perlu diimbangi dengan pemenuhan dari sisi produksi dan investasi di Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh kelompok masyarakat tersebut.

2) Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan Ekonomi Hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”-nya. Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang meliputi : (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi menyiapkan secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan smart grid termasuk jaringan interkoneksi dalam (island grid) dan antar pulau (national grid) serta sistem terisolasi (isolated grid); (iv) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (battery/energy storage system); (v) pengembangan

transportasi ramah lingkungan; (vi) penerapan ekonomi sirkular; (vii) pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan; (viii) penguatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal maupun nonfiskal untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan green financing dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi hijau, serta (ix) penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor. Paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

b) Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

1) Green dan blue economy serta pembangunan inklusif

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan green economy. Perekonomian yang bersih atau “clean economy” mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau “blue economy” mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemanfaatan laut, samudera, dan sumber daya alam didalamnya dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengedepankan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan

ekonomi, sosial, politik antarindividu, antar kelompok, dan antar wilayah.

2) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Daya saing sumber daya manusia mengacu pada kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global serta kontribusi pada pembangunan. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, derajat kesehatan, dan karakter sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dengan menciptakan karakter sosial budaya yang inklusif yang akan membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

c) Isu Strategis Kabupaten Bogor 2025-2029

1) Bonus Demografi

Kabupaten Bogor telah mengalami perubahan demografi yang cepat, meskipun jumlah penduduk usia produktif diprediksi terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2035-2040. Dalam periode tersebut Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan angkatan kerja terbanyak di Jawa Barat. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) juga meningkat. Dengan demikian, tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan hal-hal melalui penyiapan kebijakan untuk mewujudkan penduduk berkualitas.

2) Percepatan dan Peningkatan Efektifitas Pengentasan Kemiskinan

Terkait isu percepatan dan pengentasan kemiskinan melibatkan sejumlah faktor kunci yang harus dipertimbangkan. Berikut beberapa substansi yang harus diperhatikan terkait pengentasan kemiskinan, yaitu: (1)

peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, (2) pemberdayaan ekonomi, (3) akses terhadap pelayanan kesehatan, (4) penguatan infrastruktur, (5) perlindungan sosial, (6) ketimpangan sosial ekonomi, (7) partisipasi masyarakat. Menghadapi isu strategis pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik, integratif, dan berkelanjutan yang melibatkan kerjasama pemerintah, sektor swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat.

3) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada kemampuan individu atau angkatan kerja suatu daerah untuk bersaing secara efektif di pasar kerja global. Hal ini melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas, kreativitas, dan adaptabilitas SDM dalam lingkungan ekonomi secara kompetitif. Dalam perspektif lain SDM juga melihat kepada tingkat pendidikan, dan derajat kesehatan penduduk, serta kemampuan ekonomi penduduk suatu daerah. Pembangunan masyarakat dari sisi aspek sosial dan moralitas juga perlu mendapat perhatian. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat, yang mempunyai kesadaran sosial, tata nilai dan hukum yang tinggi sehingga pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang berkeadaban.

d) Isu-isu Strategis Lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025-2029

1) Belum optimalnya kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan toko modern;

Kemitraan antara UMKM dan toko modern di Kabupaten Bogor masih terbatas, baik dari sisi jumlah pelaku usaha yang maupun kelengkapan persyaratan administratif dan kualitas produk. Padahal, toko modern merupakan saluran pemasaran potensial yang mampu membuka akses pasar lebih luas. Belum optimalnya kolaborasi ini menghambat skala usaha IKM di Kabupaten Bogor untuk berkembang secara berkelanjutan.

2) Kualitas sarana distribusi perdagangan belum sesuai standar;

Sebagian besar pasar rakyat di Kabupaten Bogor masih belum memenuhi kriteria pasar bersih, sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan standar nasional (SNI). Hal ini menyebabkan turunnya daya tarik pasar tradisional yang berdampak pada minat konsumen dan mengurangi daya saing dengan pusat perbelanjaan modern.

3) Terbatasnya kontribusi produk ekspor kabupaten bogor;

Potensi produk ekspor dari Kabupaten Bogor seperti hasil pertanian, olahan makanan, kerajinan, dan industri kreatif belum sepenuhnya tergarap. Hambatan utama meliputi rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar internasional, belum adanya ekosistem ekspor daerah, serta terbatasnya akses informasi pasar luar negeri.

4) Belum optimalnya Pengawasan harga barang pokok dan barang penting serta system distribusi rantai pasok di Kabupaten Bogor.

Fluktuasi harga barang pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula sering terjadi terutama menjelang hari besar atau musim paceklik. Ini menunjukkan perlunya penguatan sistem distribusi, cadangan pasokan daerah, dan pengawasan harga untuk menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan pangan daerah.

5) Belum Optimalnya jangkauan pelayanan dan pengawasan kemetrolagian dalam menjamin kepastian ukuran dan perlindungan konsumen.

Fungsi kemetrolagian, seperti tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), sangat penting dalam menciptakan keadilan dalam transaksi perdagangan. Namun, di Kabupaten Bogor, jangkauan layanan ini masih belum menjangkau seluruh pasar, pelaku usaha, dan lokasi terpencil. Rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas alat ukur, serta keterbatasan sumber daya pengawasan, menyebabkan masih adanya praktik curang yang merugikan konsumen. Kondisi ini

melemahkan kepercayaan publik terhadap pasar dan menciptakan ketimpangan dalam perdagangan lokal.

6) Belum Optimalnya Pengembangan dan penguatan sentra IKM;

Sentra IKM berperan penting sebagai penggerak ekonomi lokal, namun banyak sentra di Kabupaten Bogor masih berkembang secara sporadis tanpa perencanaan kawasan yang terintegrasi. Fasilitas penunjang seperti infrastruktur produksi, pelatihan teknologi, inkubator bisnis, dan konektivitas pasar masih terbatas. Selain itu, masih banyak IKM yang belum masuk dalam sistem kluster industri yang mampu memperkuat jejaring antar pelaku usaha. Akibatnya, produktivitas IKM belum maksimal, nilai tambah produk rendah, dan daya saing belum mampu menembus pasar luar.

7) Belum optimalnya akses dan kepatuhan pelaku IKM terhadap sistem perizinan berbasis risiko dan regulasi industri.;

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) oleh Pemerintah Pusat belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku IKM di Kabupaten Bogor. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas usaha, dokumen teknis, serta sertifikasi yang diwajibkan. Kurangnya pendampingan, keterbatasan digitalisasi, dan hambatan birokrasi juga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar keselamatan, lingkungan, dan mutu produk. Hal ini menghambat akses IKM terhadap program bantuan, pembiayaan, maupun peluang kerja sama dengan mitra besar.

8) Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Standardisasi Industri.

Sebagian besar pelaku industri kecil di Kabupaten Bogor masih menggunakan alat dan metode produksi tradisional dengan produktivitas rendah. Akses terhadap teknologi tepat guna, mesin modern, dan pelatihan inovasi industri masih sangat terbatas. Selain itu, minimnya pemahaman dan penerapan standar industri (SNI atau standar mutu lainnya) menyebabkan produk sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif dan ketat regulasinya. Tanpa dukungan teknologi

dan standardisasi, sulit bagi pelaku usaha untuk meningkatkan skala produksi, konsistensi kualitas, dan penetrasi pasar ekspor.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor memiliki peran strategis dalam mengembangkan sektor perdagangan dan industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan potensi, kondisi eksisting, dan kebijakan pelayanan yang dijalankan, berikut adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

a) Kekuatan (Strengths)

Kabupaten Bogor memiliki keunggulan geografis yang sangat strategis karena berada di antara pusat kegiatan ekonomi nasional (DKI Jakarta) dan provinsi Jawa Barat. Posisi ini menjadikan daerah ini sebagai kawasan potensial untuk pengembangan perdagangan dan industri. Selain itu, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM/IKM) yang besar menjadi aset daerah dalam mendorong promosi produk lokal. Ketersediaan lahan di beberapa wilayah juga memungkinkan pengembangan kawasan industri baru yang mendukung pelayanan sarana dan prasarana industri. Pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mempercepat pelayanan publik, termasuk kemudahan perizinan serta dukungan terhadap penjaminan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta pengawasan terhadap harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

b) Kelemahan (Weaknesses)

Meski memiliki potensi besar, beberapa kelemahan masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satunya adalah belum meratanya infrastruktur perdagangan dan industri, khususnya di wilayah pinggiran atau perdesaan. Digitalisasi layanan perizinan dan promosi produk daerah masih belum optimal, sehingga memperlambat proses pelayanan.

Data sektoral perdagangan dan industri juga belum terintegrasi secara baik, menyebabkan kelemahan dalam

perencanaan. Ketergantungan pada pasar tradisional tanpa inovasi model bisnis membuat daya saing rendah. Selain itu, koordinasi antar instansi teknis terkait penyediaan sarana-prasarana perdagangan dan industri belum berjalan maksimal.

c) Peluang (Opportunities)

Transformasi digital dan tren ekonomi kreatif memberikan peluang besar bagi daerah untuk mempromosikan produk lokal secara lebih luas melalui platform daring. Adanya kebijakan nasional seperti perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) dan program penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sangat mendukung penyelenggaraan pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian.

Selain itu, minat investasi dari swasta untuk pengembangan kawasan industri, khususnya di wilayah selatan dan timur Kabupaten Bogor, menjadi peluang besar untuk memperkuat basis industri daerah. Kerja sama antar daerah, dengan BUMD atau sektor swasta dalam pengelolaan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, juga dapat meningkatkan stabilitas harga dan ketersediaan barang di Kabupaten Bogor.

d) Tantangan (Threats)

Pelayanan publik di sektor perdagangan dan perindustrian juga menghadapi sejumlah tantangan. Fluktuasi harga komoditas nasional dan global dapat mempengaruhi kestabilan harga di daerah. Persaingan produk lokal dengan produk luar daerah bahkan luar negeri yang memiliki kualitas dan harga lebih kompetitif menjadi ancaman serius bagi pelaku usaha lokal.

Ketergantungan terhadap regulasi pusat, khususnya dalam hal perizinan industri strategis, sering menjadi penghambat bagi daerah untuk bertindak lebih cepat dan responsif. Selain itu, ketidakpastian iklim investasi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta potensi penolakan sosial dalam pengembangan kawasan industri menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan perdagangan dan industri di Jawa Barat. Namun,

dibutuhkan penguatan pada aspek digitalisasi layanan, penguatan data sektoral, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna mengatasi kelemahan dan tantangan yang ada. Dengan memaksimalkan kekuatan internal dan menangkap peluang eksternal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dapat menghadirkan pelayanan yang lebih adaptif, responsif, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Tabel 2.2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor 2022-2024

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra			Realisasi Capaian			Rasio Capaian pada Tahun				
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
		Indikator Tujuan												
	Meningkatnya daya saing perdagangan, perindustrian dan kemetrolagian	Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan	Juta Rupiah	30.458.197	30.458.197	35.840.869	30.594.889	32.391.850	38.367.000	86,66	98,03	100,45	106,35	107,05
		Nilai Tambah Bruto (NTB) Perindustrian	Juta Rupiah	131.268.133	131.268.133	151.653.375	129.584.167	141.864.330	160.985.000	90,14	98,03	98,72	108,07	106,15
		Indikator Sasaran												
	Perdagangan dalam negeri dan ekspor meningkat	Nilai ekspor	%	1	1	2,14	1	1	2,15					
		Cakupan wilayah tertib ukur	%	100	100	80,02	100	100	121,00					
	Meningkatnya Pertumbuhan industri kecil menengah	Presentase pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan	%	60	100	50,45	40	60	50,75					
		Indikator Outcome Program												

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra			Realisasi Capaian			Rasio Capaian pada Tahun				
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPI /SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM /IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	62,30	65,50	66,00	60,66	97,57	66,00					
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang dibina	%	33	33	33,33	33	33	33,33					
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	80	90	100,00	60,00	80,93	100,00					
		IHK (indeks harga konsumen) Bahan Makanan	Point	106	107	N/A	109,19	106,00	N/A					
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)	USD	1.500.000.000	1.510.000.000	1.532.650.000	1.708.720.834	1.771.109.022	##### ###					
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	79	79	57,42	79,04	89,73	57,42					
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah jenis produk dalam negeri yang di pasarkan tahun ke-n	%	5	5	33,33	1	1	33,33					

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra			Realisasi Capaian			Rasio Capaian pada Tahun				
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	60	100	50,45	50	80	50,75					
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	0,8	0,9	3,30	0,80	0,88	3,30					
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	1	1	1,00	1	1	1,00					

**Tabel 2.2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
PROGRAM PENGEMBA NGAN PERDAGAN GAN	38.811.549.000					35.071.052.665					90,36						
Pembinaan Usaha Sarana Perdagangan	331.459.000					320.478.000					96,69						
Pembangunan Sarana Perdagangan	32.947.205.000					29.350.061.035					89,08						
Pengadaan dan Penyaluran Barang Beredar	3.792.828.000					3.716.950.630					98,00						
Kegiatan Ekspor dan Promosi Perdagangan	1.000.057.000					960.604.000					96,05						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
PENYEDIAAN FASILITAS PENUNJANG PROTOKOL KESEHATAN PADA PASAR RAKYAT (DID TAMBAHAN)	540.000.000					524.246.000					97,08						
Pengadaan Hand Sanitizer Dan Masker Untuk Pkl Disekitar Kawasan Puncak (Hibah Pariwisata)	200.000.000					198.713.000					99,36						
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA	3.084.647.300					3.009.790.970					97,57						
Kegiatan Bina Tata Niaga	419.827.000					419.611.540					99,95						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Tata Niaga dan Kemetrologia n	360.647.000					356.186.700					98,76						
Kegiatan Pelayanan Kemetrologia n	2.054.173.300					1.988.182.790					96,79						
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBH-CHT)	250.000.000,00					245.809.940					98,32						
PROGRAM PENGEMBA NGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	8.924.948.000					8.653.192.401					96,96						
Kegiatan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah	2.603.038.000					2.539.451.400					97,56						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Industri Kecil dan Menengah	4.442.219.000					4.344.382.001					97,80						
Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Industri Kecil dan Menengah	1.879.691.000					1.769.359.000					94,13						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	8.240.983.000,00					7.651.249.697,00					92,84						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.064.000					264.396.843					95,08						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.124.000					18.124.000					100,00						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000					10.000.000					100,00						
Penyediaan Makanan dan Minuman	130.000.000					129.889.775					99,92						
Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	68.995.000					68.105.000					98,71						
Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	156.036.000					155.132.000					99,42						
Pengelolaan Keamanan Kantor	509.912.000					494.492.000					96,98						
Pengelolaan Kebersihan Kantor	535.613.000					507.415.450					94,74						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	15.750.000					15.194.500					96,47						
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.033.588.300					2.013.390.073					99,01						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	746.879.000					737.628.000					98,76						
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	103.800.000					103.799.330					100,00						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	52.500.000					52.479.000					99,96						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	26.150.000					25.000.000					95,60						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=2020-2024/5*100	18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	30.000.000					29.768.605					99,23						
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	773.954.700					773.954.161					100,00						
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	95.755.000					94.387.000					98,57						
Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	12.000.000					12.000.000					100,00						
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	104.118.000					102.718.000					98,66						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	550.250.000					546.435.000					99,31						
Penyusunan Pelaporan Keuangan	39.600.000					39.600.000					100,00						
Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	207.716.000					206.530.460					99,43						
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	99.373.000					98.787.000					99,41						
Penyusunan Perencanaan Anggaran	179.065.000					178.638.000					99,76						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	803.740.000					793.885.500					98,77						
Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	180.000.000					179.500.000					99,72						
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	741.887.102	1.725.687.470	1.536.158.575	2.085.615.743	-	723.826.318	1.704.202.640	1.497.058.567	2.041.326.016		97,57	98,75	97,45	97,88		
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	450.388.712	552.579.986	475.092.445	493.787.967	-	437.115.908	552.545.956	474.542.445	493.723.896		97,05	99,99	99,88	99,99		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		450.38 8.712	552.57 9.986	475.09 2.445	493.78 7.967		437.11 5.908	552.54 5.956	474.54 2.445	493.72 3.896		97, 05	99, 99	99, 88	99, 99		
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	26.843 .050	315.20 1.018	539.21 3.664	720.33 9.255	-	26.843 .050	313.42 0.376	538.21 3.457	713.87 5.745		10 0,0 0	99, 44	99, 81	99, 10		
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		26.843. 050	315.20 1.018	539.21 3.664	720.33 9.255		26.843. 050	313.42 0.376	538.21 3.457	713.87 5.745		10 0,0 0	99, 44	99, 81	99, 10		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-	66.439.400	154.364.942	54.405.377	98.304.129	-	65.439.400	153.184.523	54.405.377	98.303.823		98,49	99,24	100,00	100,00		
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		32.626.900	77.293.142	27.118.255	57.366.642		31.626.900	77.043.046	27.118.255	57.366.336		96,94	99,68	100,00	100,00		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		33.812.500	77.071.800	27.287.122	40.937.487		33.812.500	76.141.477	27.287.122	40.937.487		100,00	98,79	100,00	100,00		
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	333.749.713	51.866.377	2.040.000	-	-	316.099.545	51.786.377	2.040.000			94,71	99,85	100,00		
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya			52.354.648	21.460.673	680.000			52.354.531	21.420.673	680.000			100,00	99,81	100,00		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Terfasilitasi ya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PAB2			216.369.925	10.243.240	680.000			199.625.874	10.203.240	680.000			92,26	99,61	100,00		
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			65.025.140	20.162.464	680.000			64.119.140	20.162.464	680.000			98,61	100,00	100,00		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal	-	198.21 5.940	369.79 1.811	415.58 0.712	771.14 4.392	-	194.42 7.960	368.95 2.240	378.11 0.911	733.38 2.552		98, 09	99, 77	90, 98	95, 10		
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		198.21 5.940	369.79 1.811	415.58 0.712	771.14 4.392		194.42 7.960	368.95 2.240	378.11 0.911	733.38 2.552		98, 09	99, 77	90, 98	95, 10		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	33.069 .400.4 33	21.945 .720.1 89	14.163 .996.3 43	15.063 .997.0 46	-	32.203 .825.1 74	19.887 .626.2 11	13.600 .468.2 02	14.547 .086.7 41		97, 38	90, 62	96, 02	96, 57		
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	32.757 .346.6 98	21.112 .316.5 17	12.941 .315.8 89	14.112 .773.6 02	-	31.902 .842.8 52	19.119 .046.9 39	12.425 .499.3 87	13.604 .555.2 64		97, 39	90, 56	96, 01	96, 40		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		32.757.346.698	19.555.502.113	12.497.512.756	5.815.073.231		31.902.842.852	18.369.210.049	12.018.155.542	5.696.734.114		97,39	93,93	96,16	97,96		
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.556.814.404	443.803.133	8.297.700.371			749.836.890	407.343.845	7.907.821.150			48,16	91,78	95,30		
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	312.053.735	833.403.672	1.222.680.454	951.223.444	-	300.982.322	768.579.272	1.174.968.815	942.531.477		96,45	92,22	96,10	99,09		
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		247.757.835	566.078.117	389.305.133	379.315.347		237.261.422	534.994.177	365.990.830	377.025.346		95,76	94,51	94,01	99,40		
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		64.295.900	267.325.555	833.375.321	571.908.097		63.720.900	233.585.095	808.977.985	565.506.131		99,11	87,38	97,07	98,88		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	387.243.100	12.066.205.621	1.048.298.121	924.368.364	-	381.446.298	6.671.067.938	1.032.124.082	913.920.388		98,50	55,29	98,46	98,87		
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	359.279.103	210.405.075	265.218.293	-	-	334.840.670	206.679.825	262.931.365			93,20	98,23	99,14		
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			58.288.342	59.693.200	125.720.648			55.177.135	59.692.950	125.660.648			94,66	100,00	99,95		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			228.777.496	114.897.375	110.915.003			216.832.245	114.897.375	109.085.003			94,78	100,00	98,35		
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			72.213.265	35.814.500	28.582.642			62.831.290	32.089.500	28.185.714			87,01	89,60	98,61		
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	-	373.639.800	11.500.438.154	491.686.371	561.156.699	-	367.847.398	6.144.580.668	486.207.582	559.354.151		98,45	53,43	98,89	99,68		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		161.62 7.250	229.62 0.896	139.19 8.121	274.04 1.126		158.57 7.298	226.92 0.013	139.54 8.332	273.92 7.078		98, 11	98, 82	10 0,2 5	99, 96		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		4.597.2 00	258.15 6.819	211.33 0.350	207.10 6.923		4.590.8 00	250.40 4.600	210.46 3.450	206.14 2.923		99, 86	97, 00	99, 59	99, 53		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		207.415.350	11.012.660.439	141.157.900	80.008.650		204.679.300	5.667.256.055	136.195.800	79.284.150		98,68	51,46	96,48	99,09		
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	13.603.300	206.488.364	346.206.675	97.993.372	-	13.598.900	191.646.600	339.236.675	91.634.872		99,97	92,81	97,99	93,51		
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			103.345.757	80.956.550	16.236.725			92.846.650	80.456.550	16.236.725			89,84	99,38	100,00		
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		6.523.750	14.949.490	116.656.250	20.645.900		6.523.750	14.127.000	111.136.250	18.145.900		100,00	94,50	95,27	87,89		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		7.079.550	88.193.117	148.593.875	61.110.747		7.075.150	84.672.950	147.643.875	57.252.247		99,94	96,01	99,36	93,69		
PROGRAM PENGEMBARAN EKSPOR	-	100.825.550	1.809.250.214	2.371.799.579	1.360.001.317	-	100.450.550	1.775.875.975	2.301.565.501	1.303.559.527		99,63	98,16	97,04	95,85		
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	100.825.550	1.809.250.214	2.371.799.579	1.360.001.317	-	100.450.550	1.775.875.975	2.301.565.501	1.303.559.527		99,63	98,16	97,04	95,85		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=2020-2024/5*100	18
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota		32.091.050	401.687.184	258.962.465			32.091.050	382.043.394	241.948.465			100,00	95,11	93,43	#DIV/0!		
Pameran Dagang Nasional			352.086.127	265.153.860	1.143.121.168			348.272.279	249.175.036	1.087.679.378			98,92	93,97	95,15		
Pameran Dagang Lokal			241.421.562	1.144.494.283	189.539.527			238.382.376	1.115.635.633	188.539.527			98,74	97,48	99,47		
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan										-							
Peningkatan Citra Produk Ekspor			310.444.286	106.839.757	27.340.622			306.285.765	105.851.757	27.340.622			98,66	99,08	100,00		
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		68.734.500	503.611.055	596.349.214			68.359.500	500.892.161	588.954.610			99,45	99,46	98,76	#DIV/0!		
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	1.432.327.040	2.588.934.509	2.124.053.156	1.782.068.168	-	1.427.382.148	2.510.444.067	2.105.652.149	1.778.039.811		99,65	96,97	99,13	99,77		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	1.432.327.040	2.588.934.509	2.124.053.156	1.782.068.168	-	1.427.382.148	2.510.444.067	2.105.652.149	1.778.039.811		99,65	96,97	99,13	99,77		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		1.309.28.740	2.243.282.499	1.740.275.574	1.057.168.392		1.305.972.324	2.207.828.131	1.730.649.567	1.053.409.671		99,75	98,42	99,45	99,64		
Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal		123.098.300	345.652.010	383.777.582	724.899.776		121.409.824	302.615.936	375.002.582	724.630.140		98,63	87,55	97,71	99,96		
Penyidikan Metrologi Legal																	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	4.490.000	475.416.383	675.154.718	87.399.552	-	4.490.000	468.308.699	631.725.183	86.021.552		100,00	98,50	93,57	98,42		
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	-	4.490.000	475.416.383	675.154.718	87.399.552	-	4.490.000	468.308.699	631.725.183	86.021.552		100,00	98,50	93,57	98,42		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Dalam Negeri																	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri					3.813.400					3.813.400							
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota		2.040.000	153.027.091	514.074.793	78.906.090		2.040.000	148.510.950	481.595.258	77.906.090		100,00	97,05	93,68	98,73		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota		2.450.000	322.389.292	161.079.925	4.680.062		2.450.000	319.797.749	150.129.925	4.302.062		100,00	99,20	93,20	91,92		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	302.126.622	4.306.172.777	10.111.085.408	1.958.716.430	-	298.661.498	1.414.820.578	10.037.553.557	1.901.320.359		98,85	32,86	99,27	97,07		
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	-	302.126.622	4.306.172.777	10.111.085.408	1.958.716.430	-	298.661.498	1.414.820.578	10.037.553.557	1.901.320.359		98,85	32,86	99,27	97,07		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota			467.48 1.850					439.25 4.950					93, 96				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			207.87 8.372	143.03 7.582	238.14 6.901			207.24 4.322	143.03 7.582	209.07 8.830			99, 69	10 0,0 0	87, 79		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		217.97 3.072	411.49 9.583	7.254.5 61.210	1.456.4 20.357		214.50 9.348	405.95 5.653	7.213.1 40.918	1.436.1 70.357		98, 41	98, 65	99, 43	98, 61		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			2.912.823.732	126.282.518	52.125.705			59.285.048	124.826.518	51.955.705			2,04	98,85	99,67		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		84.153.550	260.489.430	2.558.996.098	173.824.335		84.152.150	257.409.445	2.528.340.539	165.916.335		100,00	98,82	98,80	95,45		
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			45.999.810	28.208.000	38.199.132			45.671.160	28.208.000	38.199.132			99,29	100,00	100,00		
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	199.810.318	1.537.716.924	1.155.584.876	2.037.860.243	-	194.370.162	1.468.418.192	1.155.584.876	2.009.430.743		97,28	95,49	100,00	98,60		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	199.810.318	1.537.716.924	1.155.584.876	2.037.860.243	-	194.370.162	1.468.418.192	1.155.584.876	2.009.430.743		97,28	95,49	100,00	98,60		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota		89.726.650	655.063.522	571.326.100	1.174.178.816		88.891.650	634.924.922	571.326.100	1.166.948.816		99,07	96,93	100,00	99,38		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=2020-2024/5*100	18
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		110.08 3.668	882.65 3.402	584.25 8.776	863.68 1.427		105.47 8.512	833.49 3.270	584.25 8.776	842.48 1.927		95, 82	94, 43	10 0,0 0	97, 55		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	188.14 3.786	1.011. 327.82 7	837.27 1.764	1.598. 886.04 6	-	182.46 4.274	940.11 0.366	833.27 5.873	1.570. 295.62 0		96, 98	92, 96	99, 52	98, 21		
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	188.14 3.786	1.011. 327.82 7	837.27 1.764	1.598. 886.04 6	-	182.46 4.274	940.11 0.366	833.27 5.873	1.570. 295.62 0		96, 98	92, 96	99, 52	98, 21		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		159.650.786	204.963.466	45.415.774	67.498.786		153.971.274	169.878.466	43.001.124	65.536.735		96,44	82,88	94,68	97,09		
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas		28.493.000	507.767.430	656.964.466	1.127.499.733		28.493.000	486.761.500	655.385.225	1.108.791.358		100,00	95,86	99,76	98,34		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			298.59 6.931	134.89 1.524	403.88 7.527			283.47 0.400	134.88 9.524	395.96 7.527		#DIV/0!	94,93	100,00	98,04		
URUSAN PEMERINTAHAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	13.175 .011.540	18.055 .476.960	16.702 .473.106	19.761 .861.548	-	12.953 .401.342	16.774 .263.190	16.023 .010.105	19.239 .194.474		98,32	92,90	95,93	97,36		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	384.21 4.640	1.222. 796.829	1.234. 072.004	978.13 1.693	-	376.17 1.560	1.201. 936.260	1.215. 352.290	964.89 2.913		97,91	98,29	98,48	98,65		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		145.974.186	262.932.501	236.152.468	222.114.697		140.265.774	256.110.030	228.279.884	220.613.021		96,09	97,41	96,67	99,32		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		13.498.300	41.738.225	29.156.558	22.667.262		13.497.300	40.962.730	28.890.126	19.831.147		99,99	98,14	99,09	87,49		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		15.362.800	37.201.545	29.222.707	39.807.573		15.324.800	37.186.545	29.056.999	39.365.311		99,75	99,96	99,43	98,89		
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD		11.758.300	33.521.820	29.060.205	23.923.754		11.739.300	33.096.840	28.947.308	20.204.454		99,84	98,73	99,61	84,45		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		16.383.750	29.098.590	28.860.544	18.236.426		16.283.950	28.995.660	28.693.610	18.068.818		99,39	99,65	99,42	99,08		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		18.683.800	45.454.685	85.722.206	111.311.930		18.645.800	44.645.425	84.819.722	110.383.718		99,80	98,22	98,95	99,17		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Kinerja SKPD																	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		162.55 3.504	772.84 9.463	795.89 7.316	540.07 0.051		160.41 4.636	760.93 9.030	786.66 4.641	536.42 6.444		98, 68	98, 46	98, 84	99, 33		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	10.393 .755.8 56	11.152 .881.9 65	10.936 .322.3 61	11.319 .163.8 31	-	10.279 .122.8 02	10.789 .904.8 24	10.649 .458.3 77	11.218 .112.2 44		98, 90	96, 75	97, 38	99, 11		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.223. 824.20 6	10.694. 890.99 8	10.459. 778.12 0	10.878. 952.84 8		10.113. 349.10 4	10.340. 389.35 2	10.181. 493.29 0	10.785. 714.18 9		98, 92	96, 69	97, 34	99, 14		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5.481.8 50	60.119. 005	117.87 0.102	273.82 7.957		5.224.2 50	57.709. 200	115.21 1.365	273.82 7.957		95, 30	95, 99	97, 74	10 0,0 0		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=2020-2024/5*100	18
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		134.481.450	236.786.558	251.083.928	42.711.497		130.809.398	236.706.558	246.425.228	37.560.681		97,27	99,97	98,14	87,94		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10.000.000	39.269.030	29.089.642	33.998.893		10.000.000	39.069.870	28.532.815	33.998.893		100,00	99,49	98,09	100,00		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		7.460.650	-	24.552.707	43.931.357		7.325.650	-	24.310.189	42.786.155		98,19	#DIV/0!	99,01	97,39		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		8.075.400	106.233.924	38.967.212	38.994.856		8.014.450	100.447.394	38.821.932	37.878.944		99,25	94,55	99,63	97,14		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		4.432.300	15.582.450	14.980.650	6.746.423		4.399.950	15.582.450	14.663.558	6.345.425		99,27	100,00	97,88	94,06		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	17.425.000	39.398.716	37.885.527	20.762.917	-	17.425.000	19.453.850	37.192.736	20.101.064		100,00	49,38	98,17	96,81		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		8.575.000		4.743.585	6.165.782		8.575.000		4.487.384	5.960.484		100,00		94,60	96,67		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		8.850.000					8.850.000										
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik			19.550.105		5.598.662			6.053.300		5.284.650			30,96		94,39		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Daerah pada SKPD																	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			19.848.611	33.141.942	8.998.473			13.400.550	32.705.352	8.855.930			67,51	98,68	98,42		
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	420.471.650	615.721.432	235.570.059	926.335.720	-	417.668.650	603.125.895	160.806.125	910.627.450		99,33	97,95	68,26	98,30		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			9.450.375	103.011.456	269.529.670			9.317.850	99.569.825	255.720.000			98,60	96,66	94,88		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					257.808.600					256.365.000					99,44		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 2020-2024 / 5 * 100	18
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5.557.365	9.112.683	8.997.450			5.321.065	8.720.975	8.997.450			95,75	95,70	100,00		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun																	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																	
Pemindahan Tugas ASN																	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan																	

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=2020-2024/5*100	18
Tugas dan Fungsi																	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		420.471.650	405.713.692	23.445.920			417.668.650	394.331.330	22.515.325			99,33	97,19	96,03			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			195.000.000	100.000.000	390.000.000			194.155.650	30.000.000	389.545.000			99,57	30,00	99,88		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	209.830.125	1.484.937.845	554.657.222	1.973.491.522	-	206.798.089	1.280.582.434	537.006.261	1.843.429.288		98,56	86,24	96,82	93,41		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15.258.100	141.801.090	24.997.757	8.995.636		13.606.100	137.797.620	21.723.000	8.995.636		89,17	97,18	86,90	100,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		65.302.025	47.972.225	68.956.285	404.645.591		64.022.200	40.573.085	62.798.500	352.616.216		98,04	84,58	91,07	87,14		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.500.000	120.743.955	11.239.334	81.512.154		7.500.000	68.823.330	10.373.450	75.378.906		100,00	57,00	92,30	92,48		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			59.684.520	47.083.536	244.139.144			27.436.900	46.271.326	191.422.741			45,97	98,27	78,41		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7.500.000	76.887.085	41.054.794	44.680.165		7.500.000	72.469.615	37.596.000	42.755.300		100,00	94,25	91,58	95,69		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24.997.050	18.639.675	13.497.500			3.450.000	18.605.000	13.400.000			13,80	99,81	99,28		
Penyediaan Bahan/Material			47.470.920	24.999.892	17.777.954			45.129.270	22.394.500	17.777.954			95,07	89,58	100,00		
Fasilitasi Kunjungan Tamu		47.500.000	184.280.000	95.400.000	191.115.000		47.490.000	179.360.000	95.368.800	191.052.000		99,98	97,33	99,97	99,97		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		66.770.000	644.741.000	190.614.000	750.521.000		66.679.789	573.202.864	190.541.126	750.511.221		99,86	88,90	99,96	100,00		
Penatausahaan Arsip			60.680.000	24.987.390	147.608.705			58.802.250	24.650.000	145.194.564			96,91	98,65	98,36		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Dinamis pada SKPD																	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			75.680.000	6.684.559	68.998.673			73.537.500	6.684.559	54.324.750			97,17	100,00	78,73		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	435.081.995	405.712.326	960.258.946	-	-	419.679.910	395.482.750	899.189.000			96,46	97,48	93,64		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Pengadaan Alat Besar																	

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
Pengadaan Mebel			91.946.320		281.268.283			90.001.020		243.716.000			97,88		86,65		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.428.500	45.272.460	288.051.882			5.428.500	43.200.000	267.338.000			10,00	95,42	92,81		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			337.707.175	360.439.866	390.938.781			324.250.390	352.282.750	388.135.000			96,02	97,74	99,28		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.326.026.269	2.066.302.178	1.632.168.607	1.853.575.821	-	1.262.676.581	1.598.470.667	1.413.863.767	1.710.402.377		95,22	77,36	86,62	92,28		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		317.370.000	498.030.566	392.036.938	450.648.018		307.537.608	453.230.296	330.856.984	418.320.234		96,90	91,00	84,39	92,83		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		218.899.245	618.886.680	399.902.760	505.910.990		216.042.637	378.804.723	293.197.780	417.912.149		98,70	61,21	73,32	82,61		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		789.757.024	949.384.932	840.228.909	897.016.813		739.096.336	766.435.648	789.809.003	874.169.994		93,59	80,73	94,00	97,45		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	423.288.000	1.038.356.000	1.666.085.000	1.730.141.098	-	393.538.660	861.109.350	1.613.847.799	1.672.440.138		92,97	82,93	96,86	96,66		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		99.500.000	165.000.000	172.500.000	251.600.000		82.534.360	161.777.000	171.105.000	208.018.957		82,95	98,05	99,19	82,68		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		23.788.000	23.788.000	31.400.000	25.000.000		13.422.300	15.973.200	15.283.100	19.859.500		56,42	67,15	48,67	79,44		
Pemeliharaan Mebel				10.000.000					9.700.000					97,00			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024 /5*100	18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			187.960.000	147.027.000	285.970.000			180.387.250	142.840.000	282.950.000			95,97	97,15	98,94		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		300.000.000	661.608.000	1.305.158.000	1.167.571.098		297.582.000	502.971.900	1.274.919.699	1.161.611.681		99,19	76,02	97,68	99,49		
	59.062.127.300	49.601.265.491	65.521.908.874	50.725.875.646	46.660.774.457	54.385.285.733	48.470.317.764	53.615.137.856	49.218.018.095	45.390.195.231	92,08	97,72	81,83	97,03	97,28		

Tabel 2.2.6 Kertas Kerja Perumusan Permasalahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

	URAIAN	PERMASALAHAN
1	Sebagian besar UMKM belum memiliki legalitas usaha, kapasitas produksi terbatas, dan belum memenuhi standar kualitas produk sehingga sulit menjalin kemitraan dengan toko swalayan dan ritel modern.	Sebagian besar UMKM belum memiliki legalitas usaha, kapasitas produksi terbatas, serta belum memenuhi standar kualitas produk untuk bisa bermitra dengan toko swalayan
2	Kondisi pasar rakyat belum memenuhi standar kebersihan, kenyamanan, dan persyaratan pasar SNI karena minimnya sarana sanitasi, pengelolaan limbah, dan tata kelola yang baik.	Kondisi pasar rakyat yang belum memenuhi standar kebersihan, kenyamanan, dan belum terstandarisasi (SNI)
3	Volume dan diversifikasi produk ekspor daerah masih rendah disertai kurangnya fasilitasi, informasi pasar, dan pendampingan bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Kabupaten Bogor.	Masih rendahnya volume dan diversifikasi produk ekspor, serta kurangnya fasilitasi bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Kabupaten Bogor
4	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok masih tinggi akibat mekanisme distribusi yang kurang optimal dan keterbatasan intervensi pasar oleh pemerintah daerah.	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok karena kurang optimalnya mekanisme distribusi dan keterbatasan intervensi pasar
5	Banyak alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) belum tera/tera ulang serta terbatasnya jangkauan dan modernisasi layanan kemetrologian hingga wilayah terpencil.	Masih banyak alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang belum tera/tera ulang serta terbatasnya jangkauan layanan kemetrologian
6	Pengembangan sentra IKM belum optimal karena keterbatasan sarana, prasarana, inovasi teknologi, dan akses pembiayaan yang mendukung produktivitas.	Sebagian besar sentra IKM belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan sarana, prasarana, dan akses pembiayaan.
7	Kepatuhan pelaku IKM terhadap perizinan industri dan regulasi standardisasi masih rendah akibat minimnya pemahaman, pendampingan, dan integrasi layanan perizinan.	Masih banyak IKM yang belum memiliki izin usaha industri serta belum patuh terhadap regulasi dan standardisasi industri.
8	Pemanfaatan teknologi produksi dan penerapan standardisasi industri di kalangan IKM masih terbatas sehingga daya saing dan kualitas produk belum maksimal.	Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi produksi dan rendahnya penerapan standardisasi di kalangan pelaku industri kecil dan menengah.

Tabel 2.2.7 Kertas Kerja Perumusan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Jumlah UMKM yang besar dan beragam sektor	Sebagian besar UMKM belum memiliki legalitas usaha, kapasitas produksi terbatas, serta belum memenuhi standar kualitas produk untuk bisa bermitra dengan toko swalayan	Kebutuhan pengembangan kemitraan UMKM yang ramah lingkungan, mengedepankan bahan baku berkelanjutan, dan mengurangi limbah kemasan plastik.	Tren sustainable supply chain mendorong ritel global mensyaratkan pemasok memiliki sertifikasi keberlanjutan dan praktik bisnis hijau.	Program pemerintah untuk memperkuat kemitraan UMKM dengan ritel modern guna meningkatkan akses pasar produk lokal.	Dorongan penguatan rantai pasok berbasis produk daerah dan kolaborasi UMKM-toko swalayan untuk mendukung ekonomi lokal yang ramah lingkungan	Standarisasi Daya saing UMKM untuk bisa mertitra dengan toko swalayan
Pasar rakyat yang tersebar luas di wilayah strategis	Kondisi pasar rakyat yang belum memenuhi standar kebersihan, kenyamanan, dan belum terstandarisasi (SNI)	Rendahnya penerapan standar sanitasi pasar yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah pasar yang belum optimal.	Standar keamanan pangan dan green market menjadi tren global, dengan pasar tradisional bertransformasi ke arah higienis dan hemat energi.	Program revitalisasi pasar rakyat berbasis SNI yang menekankan kebersihan, keamanan pangan, dan pengelolaan sampah.	Revitalisasi pasar daerah dengan pendekatan ramah lingkungan, manajemen limbah, dan efisiensi energi.	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pasar rakyat yang sesuai standar nasional Indonesia (SNI).

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Produk unggulan Kabupaten Bogor yang berorientasi ekspor	Masih rendahnya volume dan diversifikasi produk ekspor, serta kurangnya fasilitasi bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Kabupaten Bogor	Kebutuhan peningkatan daya saing produk ekspor dengan memperhatikan jejak lingkungan (carbon footprint) dan sertifikasi hijau untuk memenuhi standar global.	Peningkatan persyaratan eco-label, jejak karbon, dan standar keberlanjutan produk ekspor di pasar global.	Strategi nasional penguatan ekspor non-migas berbasis produk unggulan daerah yang memenuhi standar internasional.	Penguatan produk ekspor unggulan Jawa Barat berbasis IKM dan pertanian berkelanjutan.	Belum optimalnya pengembangan dan promosi produk unggulan ekspor kabupaten Bogor yang berdaya saing global.
Kedekatan dengan pusat distribusi nasional	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok karena kurang optimalnya mekanisme distribusi dan keterbatasan intervensi pasar	Ketergantungan pada distribusi jarak jauh yang meningkatkan emisi transportasi dan belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal untuk mengurangi dampak lingkungan.	Krisis pangan global akibat perubahan iklim dan geopolitik mempengaruhi ketersediaan bahan pokok.	Kebijakan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui optimalisasi distribusi dan cadangan pangan.	Pengendalian fluktuasi harga melalui sinergi distribusi daerah, penguatan pasar induk, dan digitalisasi informasi harga.	Ketidakstabilan harga kebutuhan pokok yang berdampak pada daya beli masyarakat.
Fasilitas kemetrologian yang sudah tersedia	Masih banyak alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang belum tera/tera ulang serta terbatasnya jangkauan layanan kemetrologian	Rendahnya pemanfaatan teknologi kemetrologian berbasis digital yang dapat mengurangi penggunaan kertas, bahan kimia, dan limbah uji ukur.	Adopsi teknologi smart metrology untuk efisiensi energi dan pengurangan limbah uji ukur	Modernisasi kemetrologian nasional untuk mendukung perdagangan yang adil dan perlindungan konsumen.	Penguatan pengawasan alat ukur di daerah dengan penerapan teknologi digital yang hemat energi dan ramah lingkungan.	Belum optimalnya sistem kemetrologian dalam menjamin kepastian ukuran dan perlindungan konsumen.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Keberadaan embrio untuk sentra IKM di beberapa kecamatan	Sebagian besar sentra IKM belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan sarana, prasarana, dan akses pembiayaan.	Produksi IKM yang masih menghasilkan limbah padat/cair tanpa pengolahan optimal, sehingga berpotensi mencemari lingkungan.	Tren green industry dan eco-industrial park untuk meminimalkan limbah dan konsumsi energi.	Program pengembangan sentra IKM yang berdaya saing melalui teknologi ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya.	Pembangunan sentra IKM unggulan daerah yang berbasis inovasi, keberlanjutan, dan potensi lokal.	Belum optimalnya kinerja dan daya saing sentra IKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kemudahan perizinan usaha	Masih banyak IKM yang belum memiliki izin usaha industri serta belum patuh terhadap regulasi dan standardisasi industri.	Rendahnya kepatuhan IKM terhadap perizinan yang memuat aspek perlindungan lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan menghambat penerapan industri hijau.	Standarisasi izin dan sertifikasi industri yang mengakomodasi keberlanjutan dan green compliance.	Simplifikasi perizinan industri berbasis OSS-RBA dengan integrasi sertifikasi lingkungan.	Peningkatan kepatuhan IKM terhadap regulasi industri dan lingkungan hidup melalui pembinaan daerah.	Belum optimalnya tingkat legalitas dan kepatuhan IKM terhadap peraturan perindustrian yang berdampak pada akses pasar dan pembinaan.
Akses teknologi dan peluang standardisasi industri	Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi produksi dan rendahnya penerapan standardisasi di kalangan pelaku industri kecil dan menengah.	Rendahnya adopsi teknologi bersih dan energi terbarukan pada industri lokal untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi produksi.	Revolusi Industri 4.0 dan green technology mendorong inovasi produksi rendah emisi dan hemat energi.	Penerapan standardisasi industri nasional yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan efisiensi energi.	Percepatan digitalisasi industri dan adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor manufaktur daerah.	Belum optimalnya transformasi industri berbasis teknologi dan standardisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan yang selaras dengan rumusan misi nasional, provinsi Jawa Barat serta misi dan sasaran daerah Kabupaten Bogor yang diampu sebagai berikut:

❖ **Asta Cita Nasional**

- 2). Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3). Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 5). Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6). Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;



❖ **Misi ke 2 Provinsi Jawa Barat**

“Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif”



❖ **Misi ke 2 Kabupaten Bogor**

“Mewujudkan perekonomian daerah yang maju”



❖ **Tujuan Daerah**

“Meningkatnya produktifitas ekonomi daerah”



❖ **Sasaran Daerah**

“Meningkatnya produksi barang dan jasa daerah (PDRB sekunder dan tersier)”,



❖ **Tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor**

“Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian”

Tujuan ini mengarahkan seluruh upaya dinas untuk memperkuat peran sektor perdagangan dan industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produksi, perluasan akses pasar, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta penyediaan infrastruktur dan layanan pendukung yang berkualitas. Pencapaian tujuan ini akan tercermin dalam peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan investasi, dan peningkatan produktivitas pelaku usaha serta tenaga kerja di Kabupaten Bogor yang dapat terlihat dari indikator kinerja dari tujuan tersebut yang antara lain:

INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya PDRB Perdagangan	Miliar Rp	38.367	39.134	39.526	39.921	40.320	40.723
2	Meningkatnya PDRB Industri Pengolahan	Miliar Rp	160.985	162.595	164.221	165.863	167.522	169.197

Peningkatan angka ini menunjukkan harapan dan sebagai bentuk rasa optimis Pemerintah Daerah melalui sektor perdagangan dan perindustrian agar mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan. Selain menjadi indikator makro, capaian ini juga diharapkan berdampak langsung terhadap pertumbuhan investasi, peningkatan produktivitas pelaku usaha, penciptaan lapangan kerja baru, serta distribusi ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Dengan kata lain, keberhasilan pencapaian tujuan ini tidak hanya diukur dari angka PDRB semata, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

3.2. SASARAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu satu tahun atau lima tahun. Sasaran merupakan impact/dampak yang ingin dicapai oleh kepala perangkat daerah melalui perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan Perangkat Daerah. Sasaran yang

ingin dicapai menjadi representasi tepat untuk menghitung sejauhmana ketercapaian target suatu tujuan.

Sasaran Dinas Perdagangan dan perindustrian antara lain:

INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri	Ribu Rp	716.696.700	723.863.667	725.311.394	726.762.017	728.215.541	729.671.972
2	Meningkatnya nilai ekspor	USD	1.875.500.000	1.875.550.000	1.875.600.000	1.875.650.000	1.875.700.000	1.875.750.000
3	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	%	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan	%	83,84	83,85	83,86	83,87	83,88	83,89
5	Kabupaten Bogor memiliki sentra industri	Sentra	10,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00

Sasaran ini menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang lebih terfokus, terukur, serta sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menaruh harapan besar agar sasaran ini mampu menciptakan dampak langsung yang positif terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Beberapa indikator utama yang telah ditetapkan sebagai sasaran mencerminkan upaya peningkatan efektivitas kebijakan, penguatan layanan publik, serta penciptaan iklim usaha yang sehat dan kompetitif juga menjadi simbol penguatan struktur ekonomi lokal yang berbasis kerakyatan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan dalam aspek administratif, tetapi juga menggambarkan orientasi pembangunan sektoral yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Sasaran ini diharapkan dapat mendorong pencapaian visi pembangunan daerah secara menyeluruh melalui sinergi program, optimalisasi sumber daya, dan inovasi pelayanan public.

3.3. STRATEGI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029

Strategi merupakan rumusan umum mengenai pendekatan atau cara yang akan digunakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi menjadi jembatan antara analisis permasalahan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan. Melalui strategi, perangkat daerah menetapkan arah tindakan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berorientasi pada hasil, untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Strategi juga menjadi landasan dalam menentukan prioritas program, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta memastikan keterpaduan antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisis penetapan strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025-2029 yang mengacu pada dokokumen RPJMD Kabupaten Bogor 2025-2029, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan Penetapan Tujuan, Sasaran, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengacu pada:

Misi-2 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju

Terdapat beberapa prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu:

a) Stabilisasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting

Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk pengendalian inflasi di 40 kecamatan, berupa:

- 1) Pelaksanaan gerakan pangan murah;
- 2) Operasi pasar untuk masyarakat;
- 3) Pengawasan dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting.

b) Peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada

Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu produsen perikanan air tawar terbesar di Jawa Barat, dan menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu pusat penyedia benih padi unggul bersertifikat yang didukung oleh infrastruktur pertanian yang handal.

Aktivitas yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah:

- 1) Penyediaan dan pendistribusian benih ikan di sub wilayah pengembangan Dramaga, Leuwiliang, Cigudeg, Parungpanjang, Cibinong, Parung, Cigombong, Ciawi.
- 2) Pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana produksi perikanan ke masyarakat di Kawasan Minapolitan.
- 3) Penebaran benih ikan di perairan umum daratan.
- 4) Memperkuat kelompok-kelompok masyarakat pembudidaya.
- 5) Optimalisasi produksi benih padi oleh petani penangkar benih melalui pemberian bantuan berupa benih padi, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, irigasi serta gudang dan bangunan pengering.

c) Penguatan UMKM, fasilitasi kemitraan usaha dan kewirausahaan

Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Peningkatan kemitraan antara UMKM dengan toko modern;
- 2) Peningkatan kapasitas pelaku usaha/wirausaha baru;
- 3) Fasilitasi legalisasi lembaga dan produk usaha mikro.

d) Penguatan koperasi untuk pengembangan sektor riil

Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Fasilitasi pembentukan, pembinaan, dan pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- 2) Peningkatan peran koperasi dalam mendukung peran UMKM.

e) Peningkatan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru

Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi di kawasan industri, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya.
- 2) Penyederhanaan regulasi lokal untuk investasi;
- 3) Penyiapan informasi investasi;
- 4) Penyiapan daerah otonomi baru (DOB) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- 5) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun strategi dalam menjawab isu-isu kekinian yang selaras dengan rencana penyelesaian permasalahan yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1) Pengembangan kemitraan usaha mikro dengan toko modern;
Strategi ini bertujuan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro melalui kolaborasi dengan toko modern. Dalam praktiknya, Dinas akan mendorong terwujudnya skema kemitraan yang adil dan berkelanjutan, serta memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam memenuhi standar produk, legalitas usaha, dan kapasitas produksi agar dapat diterima oleh toko modern sebagai mitra. Hal ini juga mencakup pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi promosi bagi produk lokal unggulan.
- 2) Pengembangan pasar bersih dan pasar SNI;
Strategi ini berfokus pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat agar memenuhi standar nasional (SNI) dan menjadi pasar yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Peningkatan kualitas ini mencakup pembangunan atau revitalisasi fisik pasar, pengelolaan kebersihan dan sanitasi, penerapan sistem manajemen pasar yang profesional, serta edukasi bagi pedagang mengenai pentingnya pelayanan prima dan tata niaga yang sehat untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pusat perbelanjaan modern.
- 3) Pengembangan ekspor Kabupaten Bogor;
Strategi ini ditujukan untuk mendorong perluasan pasar produk lokal ke tingkat internasional. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah identifikasi dan pembinaan pelaku usaha berorientasi ekspor, pelatihan standarisasi dan sertifikasi produk sesuai kebutuhan pasar global, fasilitasi promosi melalui pameran dagang local, nasional bahkan internasional, serta pengembangan sistem informasi ekspor dan

kemitraan dengan lembaga pendukung ekspor seperti Bea Cukai, eksportir besar, dan agregator ekspor.

- 4) Stabilisasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting;
Strategi ini bertujuan menjaga keterjangkauan harga barang pokok dan penting bagi masyarakat, khususnya pada saat terjadi gangguan pasokan atau menjelang hari besar keagamaan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengawasan harga dan distribusi, penyediaan cadangan logistik pangan daerah, pelaksanaan operasi pasar, serta penguatan koordinasi dengan instansi vertikal dan pelaku usaha distribusi untuk memastikan kelancaran rantai pasok.
- 5) Pelayanan dan pengawasan kemetrolgian dalam menjamin kepastian ukuran dan perlindungan konsumen.
Strategi ini ditujukan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi perdagangan melalui kepastian ukuran, takaran, dan timbangan (UTTP). Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan memperluas jangkauan layanan tera dan tera ulang, meningkatkan kapasitas SDM kemetrolgian, serta melakukan edukasi dan penegakan hukum kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap transaksi perdagangan yang adil dan akuntabel.
- 6) Pengembangan sentra IKM;
Strategi ini fokus pada penguatan ekosistem sentra industri kecil dan menengah (IKM) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan mengembangkan sentra-sentra IKM secara terintegrasi, baik dari sisi infrastruktur, teknologi, manajemen, maupun akses pasar. Selain itu, akan dilakukan pendampingan teknis dan manajerial bagi pelaku IKM, fasilitasi kemitraan dengan sektor stakeholder, serta dukungan dalam hal branding dan pemasaran produk unggulan berbasis potensi lokal.
- 7) Optimalisasi akses perizinan industry dan kepatuhan IKM terhadap regulasi berbasis risiko.
Strategi ini bertujuan meningkatkan legalitas dan kepatuhan pelaku IKM terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan melakukan sosialisasi dan pendampingan intensif kepada pelaku usaha, menyederhanakan proses layanan perizinan, serta memperkuat koordinasi dengan instansi perizinan terkait. Tujuannya adalah agar pelaku usaha mendapatkan kemudahan akses pembiayaan, bantuan, serta kepercayaan dari mitra usaha formal.

- 8) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Standardisasi Industri;
Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku industri kecil melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan penerapan standar mutu. Dinas akan memfasilitasi pelatihan teknologi produksi, adopsi mesin-mesin industri modern, serta sertifikasi produk dan sistem mutu (seperti SNI, halal, dan lainnya). Penerapan inovasi dan standardisasi ini akan membantu produk IKM agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global secara berkelanjutan.

3.4. ARAH KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan merupakan langkah-langkah strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam dokumen perencanaan, arah kebijakan disusun untuk memberikan kejelasan mengenai prioritas dan tahapan intervensi yang akan dilakukan selama periode perencanaan. Arah kebijakan juga memastikan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang nyata terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan serta pencapaian target kinerja pemerintah daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Dokumen RPJMD 2025-2029 Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengacu pada **Misi-2 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju** dengan fokus **Arah Kebijakan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi**. Dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan isu strategis yang dihadapi sektor perdagangan dan perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor menetapkan arah kebijakan sebagai panduan operasional pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan lima tahun ke depan. Arah kebijakan ini merupakan turunan dari strategi yang telah ditetapkan, serta disusun dengan mempertimbangkan permasalahan aktual, evaluasi kinerja masa lalu, potensi daerah, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi. Arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara umum diarahkan pada peningkatan daya saing dan produktivitas sektor perdagangan dan industri, penguatan

kapasitas pelaku usaha, pengembangan infrastruktur ekonomi, serta perluasan akses pasar. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penerapan sistem perizinan berbasis risiko yang lebih akuntabel, penguatan pengawasan kemetrolgian, serta pemanfaatan teknologi dan standardisasi dalam mendukung keberlanjutan industri dan perdagangan. Melalui arah kebijakan yang terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan, diharapkan kinerja sektor perdagangan dan perindustrian Kabupaten Bogor dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel 3.3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029**

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KET	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian		1	Meningkatnya PDRB Perdagangan	Miliar Rp	35.557	38.367	39.134	39.526	39.921	40.320	
			2	Meningkatnya PDRB Industri Pengolahan	Miliar Rp	151.835	160.985	162.595	164.221	165.863	167.522	
		1	1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri	Ribu Rp	716.696.700	723.863.667	725.311.394	726.762.017	728.215.541	729.671.972	
		2	2	Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)	USD	1.875.500.000	1.875.550.000	1.875.600.000	1.875.650.000	1.875.700.000	1.875.750.000	
		3	3	Terkendalnya stabilitas harga	%	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	
		4	4	Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah	%	83,84	83,85	83,86	83,87	83,88	83,89	
		5	5	Kabupaten Bogor memiliki sentra industri	Sentra	10,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	

Tabel 3.3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

N O	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	BASAE LINE (2025)	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			Fase Fondasi dan Penetapan Baseline	Fase Pengembangan dan Implementasi Awal	Fase Perluasan dan Sinergi	Fase Penguatan Daya Saing	Fase Konsolidasi Hasil	Fase Keberlanjutan dan Transformasi Inovatif
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan kemitraan UMKM dengan Toko Swalayan;	1) Penyusunan pedoman kemitraan antara Toko Swalayan dan UMKM. 2) Pemetaan/Kurasi UMKM. 3) Sosialisasi program kemitraan antara Toko Swalayan dan UMKM.	1) Sosialisasi Standarisasi kemitraan antara Toko Swalayan dan UMKM. 2) Pendampingan MoU antara Toko Swalayan dan UMKM.	1) Monitoring awal pelaksanaan kemitraan. 2) Penyusunan sistem monitoring manajemen kemitraan UMKM dan Toko Swalayan	1) Review dan optimalisasi pola kemitraan.	1) Konsolidasi data performa kemitraan UMKM.	1) Keberlanjutan dan replikasi
2		Pengembangan pasar bersih dan pasar SNI;	1) Identifikasi kondisi eksisting pasar tradisional. 2) Penyusunan roadmap	1) Rehabilitasi awal sarana-prasarana pasar tradisional (Pendampingan SNI)	1) Penyusunan Digitalisasi manajemen pasar. 2) Sosialisasi terkait	1) Fasilitasi Sertifikasi SNI Pasar Rakyat 2) Pendampingan pasar rakyat memenuhi persyaratan pasar bersih /sehat dan modern	1) Evaluasi pasar SNI yang telah disertifikasi	Replikasi dan Keberlanjutan

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	BASAE LINE (2025)	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
			penerapan pasar SNI		standarisasi pelayanan pasar pada pengelola			
3		Pengembangan ekspor Kabupaten Bogor;	1) Pemetaan potensi komoditas unggulan ekspor Kabupaten Bogor. 2) Identifikasi pelaku usaha berorientasi ekspor. 3) Penguatan database dan baseline ekspor daerah.	1) Sosialisasi teknis ekspor bagi pelaku usaha. 2) Penyusunan regulasi teknis dan fasilitasi ekspor.	1) Pendampingan ekspor bagi pelaku usaha ekspor	1) Promosi produk ekspor binaan di forum lokal/Nasional/Internasional. 2) Penyusunan rencana misi dagang produk ekspor Kabupaten Bogor	1) Pengiriman perdana produk ekspor binaan. 2) Evaluasi hasil dan kendala ekspor daerah.	Replikasi dan Keberlanjutan

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	BASAE LINE (2025)	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
4		Stabilisasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting;	1) Penguatan sistem informasi harga berbasis digital. 2) Konsolidasi data pelaku usaha distribusi	1) Penyusunan Perencanaan Penguatan fungsi cadangan pangan strategis. 2) Optimalisasi pengendalian harga barang pokok	1) Penataan rantai distribusi barang pokok dan barang penting. 2) Digitalisasi data distribusi barang pokok dan barang penting.	1) Integrasi sistem informasi harga dengan pusat dan provinsi. 2) Kolaborasi dengan BUMD untuk distribusi.	1) Evaluasi efektivitas program stabilisasi. 2) Penguatan koordinasi lintas daerah.	1) Penyusunan Perencanaan Sistem reaksi cepat saat krisis harga.
5		Pelayanan dan pengawasan kemetroloran dalam menjamin kepastian ukuran dan perlindungan konsumen	1) Pemetaan potensi alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) 2) Perumusan perencanaan Pengadaan sarana-prasarana kemetroloran.	1) Pengadaan sarana dan prasarana metrologi Legal 2) Peningkatan SDM kemetroloran 3) Kalibrasi/verifikasi dan sertifikasi alat ukur standar.	1) Implementasi sistem informasi layanan kemetroloran berbasis digital	1) Sertifikasi daerah tertib ukur dan pasar tertib ukur	1) Evaluasi dan Optimalisasi sistem digitalisasi kemetroloran.	1) Keberlanjutan dan replikasi

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	BASAE LINE (2025)	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
6		Pengembangan sentra IKM;	1) Pemetaan dan validasi sentra IKM eksisting (15 Kecamatan). 2) Penetapan prioritas komoditas unggulan sentra IKM. 3) Penyusunan rencana pengembangan fisik dan kelembagaan .	1) Pemetaan dan validasi sentra IKM eksisting (25 Kecamatan). 2) Kajian kebutuhan sarana prasarana sentra IKM. 3) Penyusunan masterplan pengembangan sentra	1) Piloting fasilitasi terkait efektifitas Sentra IKM yang sudah dipenuhi akses sarana dan prasarana nya 2) Pemenuhan akses dan sarana - prasarana penunjang 3) Pelaksanaan rekomendasi hasil piloting	1) Peningkatan kualitas sentra IKM dari sisi: - Sarpras - SDM - Diversifikasi produk - Penyesuaian sarana - Sertifikasi Kompetensi - Perluasan akses pasar yang berorientasi ekspor	1) Tindak lanjut Sentra yang berhasil mandiri: - Pengajuan keikutsertaan IKM award dari setiap sentra IKM	1) Keberlanjutan dan replikasi
7		Optimalisasi akses perizinan industry dan kepatuhan IKM terhadap	1) Identifikasi pelaku IKM belum berizin. 2) Sosialisasi OSS dan regulasi teknis perizinan industri.	1) Pendampingan perizinan berbasis risiko untuk IKM 2) Penguatan sistem pengawasan kepatuhan	1) Intergrasi data dengan pemerintah provinsi dan	1) Penguatan pendampingan perizinan berbasis risiko untuk IKM	1) Pengembangan kapasitas dan sertifikasi IKM	1) Pengawasan dan pembinaan berkelanjutan

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	BASAE LINE (2025)	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
				regulasi industri.				
8		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Standardisasi Industri;	1) Inventarisasi pemanfaatan teknologi di sektor industri. 2) Penyusunan baseline kepatuhan terhadap standar industri. 3) Penetapan roadmap transformasi digital industri.	1) Pendampingan sertifikasi bagi IKM/UMKM. 2) Pengembangan sistem monitoring digitalisasi industri.	1) Pendampingan sertifikasi bagi IKM/UMKM. 2) Pengembangan sistem monitoring digitalisasi industri.	1) Peningkatan daya saing industri dan jaminan kualitas produk untuk pelaku usaha IKM dalam tiga pilar 1. Ekonomi 2. Lingkungan, dan 3. Sosial	1) Evaluasi Sertifikasi dan Standardisasi Industri terhadap pelaku IKM/UMKM	1) Keberlanjutan dan replikasi

**Tabel 3.3.3 Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
	Kemitraan UMKM dengan toko swalayan difokuskan pada penciptaan hubungan yang adil dan saling menguntungkan, melalui fasilitasi produk lokal agar masuk ke jaringan ritel modern. Langkah konkret meliputi kurasi produk, pelatihan peningkatan kualitas, serta pendampingan kemitraan dengan standar legalitas dan mutu.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan kemitraan UMKM dengan Toko Swalayan;	
	Revitalisasi pasar rakyat diarahkan untuk memenuhi standar SNI guna menciptakan pasar yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Upaya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, manajemen pengelolaan, serta pendampingan berkelanjutan dalam penerapan standar nasional.		Pengembangan pasar bersih dan pasar SNI;	
	Penguatan ekspor difokuskan pada peningkatan kapasitas produk lokal agar memenuhi standar internasional. Langkah yang diambil meliputi identifikasi produk unggulan, fasilitasi sertifikasi ekspor, serta promosi melalui business matching dan pameran dagang.		Pengembangan ekspor Kabupaten Bogor;	
	Pengendalian harga dilakukan melalui pemantauan pasar, penyediaan data real-time, serta pelaksanaan operasi pasar. Tujuannya adalah menjaga ketersediaan barang pokok dan barang penting dan keterjangkauan		Stabilisasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting;	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
	harga bagi masyarakat, sesuai regulasi nasional.			
	Peningkatan pelayanan metrologi dilakukan untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi memenuhi standar legal dan adil. Kegiatan meliputi tera ulang, pengawasan alat UTTP, dan edukasi kepada pelaku usaha serta konsumen.		Pelayanan dan pengawasan kemetrologian dalam menjamin kepastian ukuran dan perlindungan konsumen	
	Pengembangan sentra IKM diarahkan pada penyediaan sarana produksi bersama dan penguatan kelembagaan pelaku industri kecil. Upaya ini mencakup identifikasi potensi sentra, penyediaan fasilitas produksi, serta pelatihan dan pendampingan manajerial.		Pengembangan sentra IKM;	
	Kemudahan perizinan dan peningkatan kepatuhan IKM menjadi prioritas melalui pelayanan berbasis OSS, sosialisasi regulasi, serta pendampingan dalam pemenuhan standar legalitas usaha. Targetnya adalah peningkatan jumlah IKM yang terdaftar dan patuh regulasi.		Optimalisasi akses perizinan industry dan kepatuhan IKM terhadap	
	Transformasi industri kecil dilakukan melalui adopsi teknologi tepat guna dan penerapan standar mutu. Pendekatan operasional mencakup pelatihan digitalisasi, fasilitasi alat produksi, serta dukungan sertifikasi SNI untuk produk unggulan IKM.		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Standardisasi Industri;	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 mempedomani Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sebagian besar sub kegiatan banyak berubah dikarenakan perubahan tersebut, yang berakibat kepada pelaksanaan kegiatan-kegiatan baru yang harus relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditentukan. Terutama banyaknya program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang terkait dengan perizinan-perizinan yang sebelumnya tidak dilakukan. Juga tupoksi mengenai pembinaan terhadap IKM yang dilimpahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM.

Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor 2025-2029 tersaji dalam Tabel 6.1 sebagai berikut

4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUCI (IKK) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

a) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, khususnya dalam konteks pemerintahan. IKU menjadi komponen penting dalam sistem manajemen kinerja instansi pemerintah karena mencerminkan aspek-aspek yang paling menentukan terhadap keberhasilan organisasi. Dalam praktiknya, IKU disusun secara spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu (prinsip SMART), sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun perencanaan kinerja, menetapkan target tahunan, dan melakukan evaluasi secara periodik.

Keberadaan IKU sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan instansi pemerintah berjalan selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan. IKU membantu pimpinan dan pemangku kepentingan untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian kinerja secara objektif dan terstruktur. Selain itu, IKU juga menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) antara pimpinan dan bawahan, serta merupakan komponen utama dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

b) Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, IKK digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. IKK bersifat lebih teknis dibandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun tetap strategis karena menggambarkan output atau outcome kunci dari program dan kegiatan yang dijalankan.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

Tabel 4.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan dan perindustrian

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri	Meningkatnya pelaku usaha perdagangan	%	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan		
			meningkatnya kualitas penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	%	Persentase pelaku usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang diawasi	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
			Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Dokumen	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Dokumen		Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan TDG	%	Persentase pelaku usaha gudang yang diawasi	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan TDG	Dokumen	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi TDG	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	%	Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
			Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Dokumen	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang terlayani	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
			terfasilitasinya Pelaku usaha yang mengajukan kelengkapan izin STPW dalam negeri	Dokumen	jumlah Pelaku usaha yang di fasilitasi kelengkapan izin STPW dalam negeri	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Dokumen		Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Dokumen		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem y	
						Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
				Dokumen		Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	
				Dokumen		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	
				Dokumen		Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
						penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	
				Dokumen		Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	
						Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
				Dokumen		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
				Dokumen		Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	
			Meningkatnya kualitas pengawasan Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	%	Persentase pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang terawasi	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Pelaku usaha yang diperiksa dalam penyimpanan bahan berbahaya	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
			Pelaku usaha yang diperiksa terkait Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PAB2	
			Terawasinya pelaku usaha yang terkait Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	Jumlah pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Ekspor (SKA)	%	Persentase Permohonan SKA yang terlayani tepat waktu	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal	
			Terlayaninya Penerbitan SKA	Dokumen	Jumlah Dokumen SKA yang diterbitkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	%		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	%	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Terbangunnya Sarana dan prasarana distribusi perdagangan sesuai standar	Unit	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Sarana distribusi perdagangan yg difasilitasi	Unit	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan	Dokumen	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	Pembinaan dan Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan	
			Pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan pembinaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Bersertifikat TKDN	%	Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			meningkatnya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	%	persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
			Produk/pelaku usaha yang dilakukan promosi	UMKM	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			penggunaan produk dalam negeri		Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jaminan Kesesuaian alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya	%	Persentase alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang bersertifikat	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya	%	Persentase alat UTTP yang ditera/ tera ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
			terfasilitasinya tera/tera ulang	Unit	Jumlah alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera/tera ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			Terawasinya pelaku usaha perdagangan	Orang	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan yang diawasi	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
		Meningkatnya nilai ekspor	Meningkatnya omset penjualan produk ekspor	USD	Nilai Ekspor Daerah (berdasarkan registrasi SKA)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya Promosi Produk Ekspor unggulan melalui Pameran Dagang	%	persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Nasional	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pameran Dagang Nasional	
			Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	
			Keikutsertaan pelaku usaha dalam Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Pelaku usaha yang dilakukan peningkatan citra produk	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Peningkatan Citra Produk Ekspor	
		Terkendalinya stabilitas harga	Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	%	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kualitas pengawasan harga Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	%	Persentase pasar yang terawasi harga barang pokoknya	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			Data Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Data Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
			Data Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diawasi	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			Terdistribusikannya komoditi barang kebutuhan pokok melalui kegiatan bazar	Laporan	jumlah kegiatan bazar murah di kecamatan	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			meningkatnya kualitas pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	%	Persentase distributor Pupuk bersubsidi yang terawasi	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Pelaku usaha yang diperiksa kelengkapan dokumen perizinan	Dokumen	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
			terawasnya pupuk dan pestisida persubsidi yang tersalurkan	Laporan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Terpantaunya Distribusi Pupuk dan pestisida Bersubsidi	Laporan	Jumlah Pupuk dan pestisida Bersubsidi yang tersalurkan	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
		Meningkatnya presentase industri kecil menengah	Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya industri	%	Persentase IKM yang dibina	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Pembangunan sumber daya Industri	Pelaku Usaha	Jumlah IKM yang terbina	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
				Dokumen		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Tersusunnya data Sebaran Industri	Dokumen	Jumlah Dokumen data Sebaran Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Terbinanya Pelaku usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan yang Berkualitas	Dokumen	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Tersalurkannya Bantuan Sarana dan Prasarana Industri pada Pelaku Usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Dokumen	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Menerima Bantuan Sarana Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			Pelaku usaha industri yang dilakukan pemberdayaan	Dokumen	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
						Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Dokumen Evaluasi Industri	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			Meningkatnya pelaku usaha industri yang berijin	%	Persentase pertumbuhan pelaku usaha industri	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Industri	%	Persentase pelaku usaha Industri yang diawasi	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan usaha industri	Dokumen	Jumlah permohonan dokumen rekomendasi yang terlayani	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pelaku usaha yang diawasi dalam Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup izin usaha industri	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	%	Peresentase pelaku usaha yang melaporkan informasi industri	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya kualitas data dan Informasi Industri	%	Persentase data dan informasi Industri yang akurat dan mutakhir	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Data industri yang tersedia	Dokumen	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			tersusunnya Informasi industri	Dokumen	Jumlah pelaku usaha industri yang di fasilitasi	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
			terkumpulnya laporan industri	Dokumen	jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat	Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Tersedianya Data Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			terlaksanakannya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Pengelolaan aset yang berkualitas	%	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
			Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Tersedianya Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
			Terpenuhinya layanan kepegawaian	%	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Tersedianya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Tersedianya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	%	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
			Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	%	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	%	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Terfasilitasinya Mebel yang Dipelihara	Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
			Terfasilitasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.1.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														K E T
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																			
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya pelaku usaha Perdagangan yang berizin	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persentase pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	%	66,00	2.041.326.016	81,11	1.458.629.381	82,70	2.784.582.488	83,15	2.910.235.113	83,55	3.272.661.965	83,95	3.593.426.556	84,40	4.086.103.970	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	meningkatnya kualitas penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang diawasi	Jumlah pusat perbelanjaan / toko swalayan yang diawasi ----- x 100% Jumlah pusat perbelanjaan/toko swalayan di wilayah Kab/Kota	%	100,00	493.723.896	88,72	584.663.101	90,49	988.300.686	91,40	991.815.351	92,31	1.167.671.499	93,23	1.235.226.096	94,17	1.420.781.850	
0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Telayaninya permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan		Dokumen	50	493.723.896	50	584.663.101	65	988.300.686	70	991.815.351	75	1.167.671.499	80	1.235.226.096	85	1.420.781.850	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan TDG	Persentase pelaku usaha gudang yang diawasi	Jumlah Gudang yang diawasi ----- x 100% Jumlah	%	100	713.875.745	57,32	321.722.968	58,46	559.689.000	59,05	577.657.900	59,64	644.236.000	60,23	755.366.000	60,84	855.902.600	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALIS ASI														
				Gudang di wilayah Kab/Kota																
0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan TDG	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi TDG		Dokumen	50	713.875.745	45	321.722.968	45	559.689.000	45	577.657.900	45	644.236.000	45	755.366.000	45	855.902.600	
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Meningkatnya kualitas pengawasan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Persentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Jumlah waralaba dalam negeri penerima penerbitan STPW ----- x 100% Total waralaba di wilayah Kab/Kota	%	100	98.303.823	81,60	78.940.000	83,23	580.158.000	84,06	622.173.800	84,90	690.391.100	85,75	775.430.200	86,61	857.973.200	
0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Jumlah dokumen permohonan rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang terlayani		Dokumen	20	57.366.336	10	39.140.000	10	278.438.000	10	296.281.800	10	336.909.900	10	370.600.900	10	407.661.000	
0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	terfasilitasinya Pelaku usaha yang mengajukan kelengkapan izin STPW dalam negeri	jumlah Pelaku usaha yang di fasilitasi kelengkapan izin STPW dalam negeri		Dokumen	20	40.937.487	10	39.800.000	10	301.720.000	10	325.892.000	10	353.481.200	10	404.829.300	10	450.312.200	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														K E T
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALIS ASI														
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pengawasan Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Persentase pelaku usaha penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang terawasi	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ----- x ----- x 100% Total pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di wilayah Kab/Kota	%	100	2.040.000	100	8.583.950	100	163.910.000	100	178.301.000	100	197.131.000	100	220.844.100	100	273.928.500	
0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Pelaku usaha yang diperiksa dalam penyimpanan bahan berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		Laporan	20	680.000	20	2.520.000	20	52.501.000	20	57.751.100	20	64.526.200	20	70.978.800	20	95.276.700	
0002	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PAB2	Pelaku usaha yang diperiksa terkait Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2		Dokumen	5	680.000	5	2.940.000	5	56.252.000	5	61.877.200	5	69.064.900	5	75.971.400	5	97.768.500	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
00 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Terawasinya pelaku usaha yang terkait Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah pelaku usaha Penyimpanan, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi		Laporan	10	680.000	10	3.123.950	10	55.157.000	10	58.672.700	10	63.539.900	10	73.893.900	10	80.883.300	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Ekspor (SKA)	Persentase Permohonan SKA yang terlayani tepat waktu	Jumlah Pelaku Usaha yg mengajukan SKA $\frac{\text{---} \times 100\%}{\text{Jumlah total pelaku usaha yang mendapatkan SKA}}$	%	100	733.382.552	100	464.719.362	100	492.524.802	100	540.287.062	100	573.232.366	100	606.560.160	100	677.517.820	
00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Terlayannya Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diterbitkan		Dokumen	3.000	733.382.552	30.000	464.719.362	30.000	492.524.802	30.000	540.287.062	30.000	573.232.366	30.000	606.560.160	30.000	677.517.820	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana tahun ke-n $\frac{\text{---}}{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan}} \times 100\%$	%	33,33	14.547.086.741	40,00	17.336.818.795	46,67	12.186.483.616	56,67	14.304.077.952	66,67	16.085.441.262	76,67	17.662.029.626	86,67	20.083.585.158	

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi perdagangan difasilitasi}}{\text{Total Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah Kab/Kota}} \times 100\%$	%	13,33	13.604.555.264	20,00	16.856.539.430	26,67	11.634.954.616	36,67	13.697.396.052	46,67	15.418.091.262	56,67	16.927.944.626	66,67	19.276.091.658	
0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya Sarana dan prasarana distribusi perdagangan sesuai standar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun		Unit	2	5.696.734.114	2	9.103.927.261	2	9.128.474.616	3	11.150.323.452	3	12.776.311.462	3	14.171.986.826	3	16.384.538.058	
0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana distribusi perdagangan yg difasilitasi	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Unit	1	7.907.821.150	2	7.752.612.169	2	2.506.480.000	3	2.547.072.600	3	2.641.779.800	3	2.755.957.800	3	2.891.553.600	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Pengelola Sarana distribusi perdagangan yang dibina tahun ke-n}}{\text{100\%Total Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan}} \times 100\%$	%	23,33	942.531.477	52,73	480.279.365	60,94	551.529.000	70,70	606.681.900	80,47	667.350.000	90,23	734.085.000	100,00	807.493.500	
0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina		Dokumen	1	377.025.346	1	363.932.956	1	317.516.000	1	349.267.600	1	384.194.300	1	422.613.700	1	464.875.100	
0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelola sarana perdagangan yang dilakukan pembinaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Dokumen	1	565.506.131	1	116.346.409	1	234.013.000	1	257.414.300	1	283.155.700	1	311.471.300	1	342.618.400	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Terkendalinya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan	Jumlah pasar yang diawasi Stabilitas Harga Barang, Barang Penting dan Kebutuhan	%	100	913.920.388	100	3.210.235.313	100	3.393.546.816	100	3.546.678.520	100	3.988.365.190	100	4.379.278.182	100	4.979.699.904	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
	BARANG PENTING	Tingkat Pasar Rakyat	barang kebutuhan pokok	Pokok ----- ----- x 100% Jumlah Pasar di kabupaten/kota																
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pengawasan harga Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Persentase pasar yang terawasi harga barang pokoknya	Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting yang diawasi ----- x 100% Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting yang tersedia	%	18	262.931.365	100	174.412.457	100	225.420.474	100	250.699.100	100	257.169.000	100	300.685.900	100	325.354.500	
0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Data Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Laporan	1	125.660.648	1	47.771.511	1	225.420.474	1	250.699.100	1	257.169.000	1	300.685.900	1	325.354.500	
0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Data Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Laporan	1	109.085.003	1	63.373.749		-		-		-		-		-	
0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Data Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Laporan	1	28.185.714	1	63.267.197		-		-		-		-		-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	$KV = \frac{\text{Harga antar waktu}}{\text{Rata-rata harga}} \times 100\%$	%	8	559.354.151	6,3	2.753.535.340	6,2	2.858.375.342	6,1	2.966.253.320	6,0	3.368.497.490	5,9	3.679.623.782	5,8	4.215.480.004	
0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diawasi		Laporan	1	273.927.078	1	303.790.609	1	340.575.000	1	374.632.500	1	412.095.700	1	453.305.300	1	498.635.800	
0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Laporan	23	206.142.923	1	278.735.050	1	294.290.000	1	323.719.000	1	356.090.900	1	391.699.900	1	430.869.900	
0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terdistribusikannya komoditi barang kebutuhan pokok melalui kegiatan bazar	jumlah kegiatan bazar murah di kecamatan		Laporan	1	79.284.150	12	2.171.009.681	12	2.223.510.342	12	2.267.901.820	12	2.600.310.890	12	2.834.618.582	12	3.285.974.304	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya kualitas pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Persentase distributor Pupuk bersubsidi yang terawasi	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)}} \times 100\%$	%	75	91.634.872	71,40	282.287.516	72,83	309.751.000	73,56	329.726.100	74,29	362.698.700	75,03	398.968.500	75,79	438.865.400	

N O	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														K E T
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pelaku usaha yang diperiksa kelengkapan dokumen perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		Dokumen	1	16.236.725	1	50.094.237		-		-		-		-		-	
0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	terawasnya pupuk dan pestisida persubsidi yang tersalurkan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi		Laporan	1	18.145.900	1	90.445.927		-		-		-		-		-	
0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terpantaunya Distribusi Pupuk dan pestisida Bersubsidi	Jumlah Pupuk dan pestisida Bersubsidi yang tersalurkan		Laporan	1	57.252.247	1	141.747.352	1	309.751.000	1	329.726.100	1	362.698.700	1	398.968.500	1	438.865.400	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang teregistrasi	Jumlah pelaku usaha ekspor yang teregistrasi tahun ke-n	Pelaku usaha ekspor	1.875.427.336	1.303.559.527	430	1.753.764.371	460	2.986.621.281	490	3.121.390.787	520	3.510.114.230	550	3.854.152.233	580	4.382.576.446	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor unggulan melalui Pameran Dagang	persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti pameran ----- x 100% Jumlah Pelaku usaha ekspor	%	5,00	1.303.559.527	\	1.753.764.371	20,48	2.986.621.281	29,01	3.121.390.787	37,54	3.510.114.230	46,08	3.854.152.233	54,61	4.382.576.446	
0002	Pameran Dagang Nasional	Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Pelaku Usaha	2	1.087.679.378	10	941.477.603	10	528.145.000	10	580.959.500	10	639.055.400	10	702.960.900	10	773.257.000	
0003	Pameran Dagang Lokal	Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		Pelaku Usaha	2	188.539.527	15	596.996.960	15	361.362.000	15	397.498.200	15	437.248.000	15	480.972.800	15	529.070.100	
0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Keikutsertaan pelaku usaha dalam Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		Pelaku Usaha	-	-	5	125.000.000	5	1.554.724.281	5	1.546.304.087	5	1.777.518.930	5	1.948.297.533	5	2.286.136.246	

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pelaku usaha yang dilakukan peningkatan citra produk	Jumlah pelaku usaha yang fasilitasi		Pelaku Usaha	10	27.340.622	20	90.289.808	50	542.390.000	60	596.629.000	80	656.291.900	100	721.921.000	120	794.113.100	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang	Persentase alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/ tera ulang	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang terdata	%	57,42	1.778.039.811	100	2.107.595.814	100	3.199.503.171	100	3.343.878.845	100	3.760.309.889	100	4.128.870.571	100	4.694.960.097	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya	Persentase alat UTTP yang ditera/ tera ulang	1. Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang ----- x Jumlah Potensi Alat UTTP	%	700000	1.778.039.811	100	2.107.595.814	100	3.199.503.171	100	3.343.878.845	100	3.760.309.889	100	4.128.870.571	100	4.694.960.097	
0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	terfasilitasinya tera/tera ulang	Jumlah alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera/tera ulang		Unit	700000	1.053.409.671	750.000	1.548.372.758	760.000	2.584.299.569	770.000	2.638.400.320	780.000	2.908.273.948	800.000	3.184.526.645	810.000	3.718.989.205	
0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terawasinya pelaku usaha perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan yang diawasi		Orang	350	724.630.140	400	559.223.056	410	615.203.602	420	705.478.525	430	852.035.941	440	944.343.926	450	975.970.892	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Bersertifikat TKDN	Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	Jumlah pelaku usaha yang memiliki TKDN ----- x 100 Jumlah pelaku usaha di kabupaten/kota	%		86.021.552	16,65	242.776.465	16,96	536.902.365	17,24	561.129.764	17,59	631.010.164	17,95	692.857.578	18,30	787.851.951	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	meningkatnya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti P3DN ----- x 100% Jumlah Pelaku usaha yang sudah memiliki TKDN	%		86.021.552	21,55	242.776.465	17,75	536.902.365	17,93	561.129.764	18,11	631.010.164	18,29	692.857.578	18,48	787.851.951	
0004	Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan	Jumlah Orang yang Mengikuti		Orang	40	3.813.400	50	79.183.278	50	150.000.000	50	158.778.827	50	161.500.000	50	179.650.000	50	206.375.603	

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
	dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																	
0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Produk/pelaku usaha yang dilakukan promosi penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	5	77.906.090	10	74.691.428	10	188.169.232	10	188.919.244	10	210.980.302	10	227.632.584	10	256.739.615		
0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	5	4.302.062	15	88.901.759	20	198.733.133	20	213.431.693	20	258.529.862	20	285.574.994	20	324.736.733		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya cakupan IKM yang terbina	Persentase IKM yang dibina	%	50,75	1.901.320.359	43,10	3.440.244.751	49,32	2.298.225.677	55,52	2.401.931.741	61,71	2.701.057.059	67,88	2.965.796.624	74,04	3.372.422.683		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembangunan sumber daya Industri	Jumlah IKM yang terbina	Jumlah IKM yang dibina tahun ke-n	Pelaku Usaha	50	1.901.320.359	1.500	3.440.244.751	1.500	2.298.225.677	1.500	2.401.931.741	1.500	2.701.057.059	1.500	2.965.796.624	1.500	3.372.422.683	
0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Dokumen															

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....												KET		
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
						REALISASI														
0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya data Sebaran Industri	Jumlah Dokumen data Sebaran Industri		Dokumen	1	209.078.830	1	254.167.960	1	290.770.000	1	319.847.000	1	351.831.700	1	387.014.800	1	425.716.300	
0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terbinanya Pelaku Usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan yang Berkualitas	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina		Dokumen	1	1.436.170.357	1	807.594.019	1	719.430.602	1	750.028.268	1	847.829.357	1	945.148.043	1	1.141.206.923	
0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tersalurkannya Bantuan Sarana dan Prasarana Industri pada Pelaku Usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Menerima Bantuan Sarana Prasarana Industri		Dokumen	1	51.955.705	1	370.476.725	1	486.486.075	1	548.308.200	1	533.263.504	1	566.785.481	1	631.966.360	
0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelaku usaha industri yang dilakukan pemberdayaan	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang dibina		Dokumen	1	165.916.335	1	1.976.639.838	1	595.385.000	1	556.978.873	1	718.686.198	1	792.457.400	1	871.703.100	
0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen Evaluasi Industri	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Dokumen	1	38.199.132	1	31.366.209	1	206.154.000	1	226.769.400	1	249.446.300	1	274.390.900	1	301.830.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya cakupan pelaku usaha industri yang terfasilitasi proses pengajuan izin dan yang dilakukan pengawasan	Persentase pelaku usaha industri yang mengajukan izin dan yang dilakukan pengawasan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan (tahun ke-n) - Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan (tahun ke n-1) ----- x 100 Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan (tahun ke n-1)	%	100	2.009.430.743	1,56	624.724.220	1,84	758.194.946	2,05	792.408.041	2,29	891.090.745	2,53	978.429.543	2,81	1.112.577.356	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Industri	Persentase pelaku usaha Industri yang diawasi	Jumlah izin usaha industri yang diterbitkan tahun ke - n ----- x 100% Total izin usaha industri di wilayah Kab/kota	%	100	2.009.430.743	100	624.724.220	100	758.194.946	100	792.408.041	100	891.090.745	100	978.429.543	100	1.112.577.356	
0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan usaha industri	jumlah permohonan dokumen rekomendasi yang terlayani		Dokumen	75	1.166.948.816	80	348.929.931	80	373.567.176	80	396.751.890	80	415.439.231	80	483.666.658	80	561.312.119	
0002	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan	Pelaku usaha yang diawasi dalam Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup izin usaha industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan		Dokumen	30	842.481.927	35	275.794.289	35	384.627.770	35	395.656.151	35	475.651.514	35	494.762.885	35	551.265.237	

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
	berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terpenuhinya Informasi Industri	Indeks ketersediaan informasi industri	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan informasi industri tahun ke-n Jumlah total pelaku usaha yang registrasi di SIINAS	Point	100	1.570.295.620	125	828.734.475	125	671.965.730	125	702.287.783	125	789.747.235	125	867.153.192	125	986.044.278	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas data dan Informasi Industri	Persentase data dan informasi Industri yang akurat dan mutakhir	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SIINAS 100% total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	100	1.570.295.620	100	828.734.475	100	671.965.730	100	702.287.783	100	789.747.235	100	867.153.192	100	986.044.278	
0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	Data industri yang tersedia	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Dokumen	1	65.536.735	1	198.509.925	1	185.924.000	1	194.516.400	1	214.968.000	1	237.464.800	1	262.211.300	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
	Informasi Industri Nasional (SIINas)																			
0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	tersusunya Informasi industri	jumlah pelaku usaha industri yang di fasilitasi		Dokumen	1	1.108.791.358	1	251.978.938	1	207.590.465	1	218.612.900	1	230.474.100	1	254.521.600	1	284.403.797	
0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	terkumpulnya laporan industri	jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Dokumen	1	395.967.527	1	378.245.612	1	278.451.265	1	289.158.483	1	344.305.135	1	375.166.792	1	439.429.181	
	URUSAN PEMERINTAHAN																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Predikat	BB	19.239.194.474	BB	18.967.025.262	BB	20.417.519.653	BB	20.712.332.466	BB	23.208.916.873	BB	25.409.944.059	BB	28.796.244.321	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Jumlah dokumen yang tersedia / Jumlah Dokumen yang diperlukan	%	100	964.892.913	100	995.704.577	100	1.464.043.000	100	930.000.000	100	935.000.000	100	950.000.000	100	965.000.000	
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	3	220.613.021	3	106.912.240	3	298.512.000	3	230.000.000	3	235.000.000	3	250.000.000	3	265.000.000	
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen	1	19.831.147	1	28.156.000	1	35.156.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
		Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD																	
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1	39.365.311	1	31.222.000	1	37.222.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1	20.204.454	1	24.810.000	1	35.060.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1	18.068.818	1	27.460.000	1	31.860.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	12	110.383.718	12	23.067.600	12	100.682.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	1	536.426.444	1	649.415.051	1	775.551.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	
0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Data Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Dokumen			1	104.661.686	1	150.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Pagu Anggaran / Realisasi Anggaran	%	100	11.218.12.244	100	12.223.332.378	100	13.003.798.120	100	13.096.378.266	100	14.946.867.873	100	16.420.190.259	100	18.583.434.221	

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....												KET		
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
						REALISASI														
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksanakanya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	14	10.785.714.189	14	11.826.636.669	14	12.610.062.120	14	12.663.268.666	14	14.470.447.573	14	15.896.127.959	14	18.006.965.821	
0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	1	273.827.957	1	218.822.249	1	232.993.000	1	256.292.300	1	281.921.500	1	310.113.600	1	341.125.000	
0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen	1	37.560.681	1	58.135.000	1	56.949.000	1	62.643.900	1	68.908.200	1	75.799.100	1	83.379.000	
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	1	33.998.893	1	21.196.460	1	25.273.000	1	27.800.300	1	30.580.300	1	33.638.300	1	37.002.100	
0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen	1	42.786.155	1	21.158.000	1	25.273.000	1	27.800.300	1	30.580.300	1	33.638.300	1	37.002.100	
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	1	37.878.944	4	62.272.000	4	26.624.000	4	29.286.400	4	32.215.000	4	35.436.500	4	38.980.100	
0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	1	6.345.425	1	15.112.000	1	26.624.000	1	29.286.400	1	32.215.000	1	35.436.500	1	38.980.100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengelolaan aset yang berkualitas	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	Barang Milik Daerah yang Tercatat ----- - x 100 Jumlah Barang Milik Daerah	%	100	20.101.064	100	24.640.236	100	112.000.000	100	123.200.000	100	135.520.000	100	149.072.000	100	163.979.200	

N O	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....												K E T		
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
						REALISASI														
0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	1	5.960.484	1	6.669.087	1	16.000.000	1	17.600.000	1	19.360.000	1	21.296.000	1	23.425.600	
0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			3	5.060.049	3	16.000.000	3	17.600.000	3	19.360.000	3	21.296.000	3	23.425.600	
0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			3		3	16.000.000	3	17.600.000	3	19.360.000	3	21.296.000	3	23.425.600	
0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1		1	16.000.000	1	17.600.000	1	19.360.000	1	21.296.000	1	23.425.600	
0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	1	5.284.650	1		1	16.000.000	1	17.600.000	1	19.360.000	1	21.296.000	1	23.425.600	
0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	1	8.855.930	1	12.911.100	1	16.000.000	1	17.600.000	1	19.360.000	1	21.296.000	1	23.425.600	
0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			1		1	16.000.000	1	17.600.000	1	19.360.000	1	21.296.000	1	23.425.600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu		%	100	910.627.450	100	892.774.151	100	1.152.000.000	100	1.212.200.000	100	1.275.920.000	100	1.353.512.000	100	1.435.363.200	
0001	Peningkatan Sarana dan	Tersedianya Unit Peningkatan	Jumlah Unit Peningkatan		Unit	1	255.720.000	1	326.301.575	1	360.000.000	1	366.000.000	1	372.600.000	1	379.860.000	1	387.846.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....												KET		
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
						REALISASI														
	Prasarana Disiplin Pegawai	Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	256.365.000	2		2	165.000.000	2	181.500.000	2	199.650.000	2	219.615.000	2	241.576.500		
0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	8.997.450	1	27.039.560	1	27.000.000	1	29.700.000	1	32.670.000	1	35.937.000	1	39.530.700		
0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			70	132.380.566	70	100.000.000	70	110.000.000	70	121.000.000	70	133.100.000	70	146.410.000		
0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	389.545.000	50	407.052.450	50	500.000.000	50	525.000.000	50	550.000.000	50	585.000.000	50	620.000.000		
	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Terpenuhi pelayan administrasi umum	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi ----- - x 100 Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Ditargetkan	%	10	1.843.429.288	100	1.043.897.832	100	1.052.346.000	100	1.160.580.600	100	1.278.638.500	100	1.408.939.810	100	1.565.833.600	
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.995.636	1	12.500.000	1	12.500.000	1	13.750.000	1	15.125.000	1	16.637.500	1	18.301.200		
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	352.616.216	5	27.732.057	5	199.000.000	5	218.900.000	5	240.790.000	5	264.869.000	5	291.355.900		
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	75.378.906	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000		
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	191.422.741	1	110.039.933	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....												KET		
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
						REALISASI														
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	42.755.300	1	39.743.580	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	1	13.400.000	1	15.112.000	1	16.624.000	1	18.286.400	1	20.115.000	1	22.126.500	1	24.339.100	
0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	1	17.777.954	1	19.935.878	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	12	191.052.000	12	232.347.226	12	150.000.000	12	165.000.000	12	181.500.000	12	199.650.000	12	219.615.000	
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	4	750.511.221	4	490.676.628	4	498.726.000	4	548.598.600	4	603.458.400	4	663.804.300	4	730.184.700	
0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	1	145.194.564	1	10.678.905	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.965.000	1	21.961.500	
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	1	54.324.750	1	75.131.625	1	85.496.000	1	97.045.600	1	108.750.100	1	122.062.510	1	150.268.700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan		%	100	899.189.000	100	664.444.453	100	749.489.000	100	824.437.900	100	906.881.500	100	997.569.600	100	1.097.326.600	
0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit			1		1	550.000.000	1	605.000.000	1	665.500.000	1	732.050.000	1	805.255.000	
0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket	4	243.716.000	4	30.225.000	4	33.248.000	4	36.572.800	4	40.230.000	4	44.253.000	4	48.678.300	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALISASI														
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	2	267.338.000	2	178.050.865	2	99.745.000	2	109.719.500	2	120.691.400	2	132.760.500	2	146.036.600	
0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	4	388.135.000	4	456.168.588	4	66.496.000	4	73.145.600	4	80.460.100	4	88.506.100	4	97.356.700	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi ----- - x 100 Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.710.402.377	100	1.753.394.635	100	1.856.433.000	100	2.042.076.300	100	2.246.283.800	100	2.470.912.200	100	2.718.003.400	
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12	418.320.234	12	354.247.723	12	432.484.000	12	475.732.400	12	523.305.600	12	575.636.200	12	633.199.800	
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	417.912.149	12	440.936.000	12	432.229.000	12	475.451.900	12	522.997.000	12	575.296.700	12	632.826.400	
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	874.169.994	12	958.210.912	12	991.720.000	12	1.090.892.000	12	1.199.981.200	12	1.319.979.300	12	1.451.977.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara ----- ----- x 100 Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimiliki	%	100	1.672.440.138	100	1.368.837.000	100	1.027.410.533	100	1.323.459.400	100	1.483.805.200	100	1.659.748.190	100	2.267.304.100	
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	29	208.018.957	29	285.903.000	29	295.993.000	29	325.592.300	29	358.151.500	29	393.966.600	29	433.363.300	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														K E T
						BASE LINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						REALIS ASI														
	Kendaraan Dinas Jabatan																			
00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	29	19.859.5 00	29	25.112.0 00	29	27.624.0 00	29	30.386.4 00	29	33.425.0 00	29	36.767.5 00	29	40.444.2 00	
00 05	Pemeliharaan Mebel	Terfasilitasinya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit			10	20.225.0 00	10	33.248.0 00	10	36.572.8 00	10	40.230.0 00	10	44.253.0 00	10	48.678.3 00	
00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terfasilitasinya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	20	282.950. 000	20	35.338.0 00	20	49.872.0 00	20	54.859.2 00	20	60.345.1 00	20	66.379.6 00	20	73.017.5 00	
00 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitas		Unit	3	1.161.61 1.681	3	1.002.25 9.000	3	620.673. 533	3	876.048. 700	3	991.653. 600	3	1.118.38 1.490	3	1.671.80 0.800	
							45.390.1 95.231		49.970.5 48.847		49.233.5 45.743		52.396.3 51.012		58.838.7 14.612		64.531.9 38.164		73.282.0 66.164	

Tabel 4.1.3 Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
	Penguatan UMKM, Fasilitasi kemitraan usaha dan kewirausahaan	Meningkatnya pelaku usaha perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
		Meningkatnya kualitas penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
		Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Penyusunan perbup penataan dan pembinaan minimarket, sekaligus mencabut perbup moratorium minimarket 2. Penyusunan standarisasi UMKM untuk dapat bermitra dengan minimarket
				1. Identifikasi usaha mikro yang memenuhi persyaratan bermitra dengan toko modern 2. Pengawasan minimarket yang tidak sesuai dengan perbup pentataan dan pembinaan minimarket
	Pasar Bersih dan ber SNI	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
		Sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Terbangunnya Sarana dan prasarana distribusi perdagangan sesuai standar	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembangunan fasilitas penunjang agar pasar dapat memenuhi standar SNI Pasar (secara bertahap)
		Sarana distribusi perdagangan yg difasilitasi	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2. Fasilitasi dan pemanfaatan gudang SRG sebagai tempat penyimpanan hasil panen, terutama komoditas padi, untuk mendukung stabilitas harga
	Stabilisasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting	Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
		Meningkatnya kualitas pengawasan harga Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Data Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Fasilitasi dan pemanfaatan gudang SRG sebagai tempat penyimpanan hasil panen, terutama komoditas padi, untuk mendukung stabilitas harga
		Data Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
		Data Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
		Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
		Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1. Pengendalian dan pengawasan harga barang pokok dengan pengawasan distribusi dan operasi pasar untuk Pengendalian inflasi 2. Pengendalian dan pengawasan barang penting (pupuk dan pestisida bersubsidi)
		Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
		Terdistribusikannya komoditi barang kebutuhan pokok melalui kegiatan bazar	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
		meningkatkan kualitas pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelaku usaha yang diperiksa kelengkapan dokumen perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
		terawasanya pupuk dan pestisida persubsidi yang tersalurkan	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
		Terpantaunya Distribusi Pupuk dan pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
	Peningkatan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya omset penjualan produk ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
		Meningkatnya Promosi Produk Ekspor unggulan melalui Pameran Dagang	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	1. Pembinaan dan fasilitasi terhadap calon exportir 2. Analisis negara peluang paskar ekspor 3. Analisis kebutuhan produk ekspor
		Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	
		Keikutsertaan pelaku usaha dalam Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
		Pelaku usaha yang dilakukan peningkatan citra produk	Peningkatan Citra Produk Ekspor	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
		Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		Meningkatnya Pembangunan sumber daya Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		Tersusunnya data Sebaran Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1. Pembentukan Sentra IKM 2. Fasilitasi pengembangan IKM berupa alat kerja dan pembinaan kepada IKM
		Terbinanya Pelaku usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan yang Berkualitas	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
		Tersalurkannya Bantuan Sarana dan Prasarana Industri pada Pelaku Usaha Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
		Pelaku usaha industri yang dilakukan pemberdayaan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		Dokumen Evaluasi Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
		Meningkatnya pelaku usaha industri yang berijin	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Terlayannya permohonan rekomendasi perizinan usaha industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pelaku usaha yang diawasi dalam Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup izin usaha industri	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
		Meningkatnya kualitas data dan Informasi Industri	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Data industri yang tersedia	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
		tersusunya Informasi industri	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
		terkumpulnya laporan industri	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

Tabel 4.1.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi tahun	TARGET (TAHUN)					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tujuan	Indikator Tujuan PD								
1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian	Nilai PDRB Perdagangan	Miliar Rp	38.367	38.367,00	39.134,34	39.525,68	39.920,94	40.320,00	40.723,00
		Nilai PDRB Industri Pengolahan	Miliar Rp	160.985,00	160.985,00	162.594,85	164.220,80	165.863,01	167.522,00	169.197,00
	Sasaran	Indikator Sasaran PD								
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri	Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri	Ribu Rp		716.696.700	723.863.667	725.311.394	726.762.017	728.215.541	729.671.972
2	Meningkatnya nilai ekspor	Nilai Ekspor (berdasarkan registrasi SKA)	USD	1.875.427.336,48	1.875.500.000	1.875.550.000	1.875.600.000	1.875.650.000	1.875.700.000	1.875.750.000
3	Terkendalinya stabilitas harga	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	%		17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00
4	Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan	%		83,84	83,85	83,86	83,87	83,88	83,89

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi tahun	TARGET (TAHUN)					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Kabupaten Bogor memiliki sentra industri	Sentra Industri Kecil Menengah yang Ditetapkan	Sentra		10,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00

Tabel 4.1.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya pelaku usaha Perdagangan yang berizin	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Persentase pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota}} \times 100\%$	%	81,11	82,70	83,15	83,55	83,95	84,40	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana tahun ke-n}}{\text{Jumlah sarana distribusi perdagangan}} \times 100\%$	%	40,00	46,67	56,67	66,67	76,67	86,67	
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terkendalnya harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Rakyat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok	$\frac{\text{Jumlah pasar yang diawasi Stabilitas Harga Barang, Barang Penting dan Kebutuhan Pokok}}{\text{Jumlah Pasar di kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang teregistrasi	Jumlah pelaku usaha ekspor yang teregistrasi tahun ke-n	Pelaku usaha ekspor	430	460	490	520	550	580	

NO	PROGRAM	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya cakupan alat ukur yang ditera/ tera ulang	Persentase alat (UTTP) ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/ tera ulang	$\frac{\text{Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang terdata}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Bersertifikat TKDN	Persentase pelaku usaha yang bersertifikat TKDN	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki TKDN}}{\text{Jumlah pelaku usaha di kabupaten/kota}} \times 100$	%	16,65	16,96	17,24	17,59	17,95	18,30	
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya cakupan IKM yang terbina	Persentase IKM yang dibina	$\frac{\text{Jumlah IKM yang dibina}}{\text{Jumlah populasi IKM}} \times 100$	%	43,10	49,32	55,52	61,71	67,88	74,04	
8	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya cakupan pelaku usaha industri yang terfasilitasi proses pengajuan izin dan yang dilakukan pengawasan	Persentase pelaku usaha industri yang mengajukan izin dan yang dilakukan pengawasan	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan (tahun ke-n) - Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan (tahun ke n-1)}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan (tahun ke n-1)}} \times 100$	%	1,56	1,84	2,05	2,29	2,53	2,81	

NO	PROGRAM	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS HITUNG	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terpenuhinya Informasi Industri	Indeks ketersediaan informasi industri	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan informasi industri tahun ke-n -----x Jumlah total pelaku usaha yang registrasi di SIINAS	Point	125	125	125	125	125	125	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman arah pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi landasan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan provinsi.

Renstra ini dirumuskan dengan memperhatikan dinamika pembangunan, tantangan global dan lokal, serta aspirasi masyarakat dan dunia usaha, khususnya pelaku usaha perdagangan dan industri. Fokus pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian telah diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur melalui indikator kinerja yang jelas, guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat diarahkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Ke depan, pelaksanaan Renstra ini menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan implementasi Renstra tidak hanya ditentukan oleh kekuatan perencanaan, tetapi juga oleh komitmen dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen ini akan menjadi instrumen hidup (*living document*) yang terbuka terhadap penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan strategis atau kondisi eksternal yang signifikan.

Akhirnya, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang kuat dalam mewujudkan sektor perdagangan dan perindustrian yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing, demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor secara berkelanjutan.

BUPATI BOGOR,

RUDI SUSMANTO

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman arah pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi landasan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan provinsi.

Renstra ini dirumuskan dengan memperhatikan dinamika pembangunan, tantangan global dan lokal, serta aspirasi masyarakat dan dunia usaha, khususnya pelaku usaha perdagangan dan industri. Fokus pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian telah diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur melalui indikator kinerja yang jelas, guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat diarahkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Ke depan, pelaksanaan Renstra ini menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan implementasi Renstra tidak hanya ditentukan oleh kekuatan perencanaan, tetapi juga oleh komitmen dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen ini akan menjadi instrumen hidup (*living document*) yang terbuka terhadap penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan strategis atau kondisi eksternal yang signifikan.

Akhirnya, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang kuat dalam mewujudkan sektor perdagangan dan perindustrian yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing, demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor secara berkelanjutan.

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,**

ARIF RAHMAN, SH., M.H
NIP. 197507232002121008